



**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
REPUBLIK INDONESIA

**Clarity in Transition**  
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

**Laporan Kinerja**  
KPKNL SURAKARTA

**2025**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	3
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	4
C. Sarana, Prasarana, dan Sumber Daya Manusia .....	4
D. Peran Strategis .....	5
E. Sistematika Laporan .....	6
RENCANA KINERJA	
A. Rencana Strategis .....	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	8
C. Pengukuran Kinerja .....	10
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2026 .....	11
AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	13
B. Realisasi Anggaran .....	28
C. Kinerja Lain-lain .....	28
D. Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja .....	29
PENUTUP	
A. Penutup .....	32
LAMPIRAN .....	33

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Sarana Prasarana .....	4
Tabel 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon .....	5
Tabel 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin .....	5
Tabel 1. 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan .....	5
Tabel 1. 5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia .....	5
Tabel 1. 6 Komposisi Pegawai Per Subbagian/Seksi.....	5
Tabel 2. 1 SASARAN STRATEGIS DAN IKU .....	10
Tabel 2. 2 Rencana Kinerja Tahun 2026 .....	11
Tabel 3. 1 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 2025 .....	13
Tabel 3. 2 Adendum Perubahan Target Triwulan IV .....	15
Tabel 3. 3 IKU SS 1.....	15
Tabel 3. 4 IKU Indeks Integritas.....	15
Tabel 3. 5 IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang.....	16
Tabel 3. 6 Rincian Kegiatan Penghasil PNBP .....	16
Tabel 3. 7 IKU SS 2.....	17
Tabel 3. 8 IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara.....	17
Tabel 3. 9 IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang.....	18
Tabel 3. 10 IKU Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara .....	18
Tabel 3. 11 IKU SS 3 .....	19
Tabel 3. 12 IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi.....	19
Tabel 3. 13 IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan .....	20
Tabel 3. 14 IKU SS 4 .....	20
Tabel 3. 15 IKU Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan.....	20
Tabel 3. 16 IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN .....	21
Tabel 3. 17 IKU SS 5 .....	21
Tabel 3. 18 IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara .....	22
Tabel 3. 19 IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian .....	22
Tabel 3. 20 IKU Persentase Produktivitas Lelang .....	23
Tabel 3. 21 IKU SS 6 .....	23
Tabel 3. 22 IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran.....	24
Tabel 3. 23 IKU Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa .....	24
Tabel 3. 24 IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai.....	25
Tabel 3. 25 IKU SS 7 .....	25
Tabel 3. 26 IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum.....	26
Tabel 3. 27 IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) .....	26
Tabel 3. 28 IKU SS 8 .....	27
Tabel 3. 29 IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko .....	27
Tabel 3. 30 IKU Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK.....	27
Tabel 3. 31 Realisasi Anggaran 2025 .....	28

**DAFTAR GAMBAR**

<i>Gambar 1. 1 Struktur Organisasi KPKNL Surakarta 2025 .....</i>	<i>4</i>
<i>Gambar 2. 1 Peta Strategi KPKNL Surakarta Tahun 2025 .....</i>	<i>9</i>
<i>Gambar 3. 1 Capaian Kinerja pada Masing-masing Perspektif .....</i>	<i>13</i>

## KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja KPKNL Surakarta 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis DJKN pada tingkat KPKNL. Laporan ini berfungsi sebagai alat monitoring, evaluasi, dan transparansi kinerja di bidang Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang, sekaligus menjadi dasar pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

DJKN memiliki visi *“Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan”*. Visi tersebut selanjutnya menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPKNL Surakarta tahun 2025. Rencana Kinerja ini berfungsi sebagai rencana kerja operasional dan kuantitatif yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang.

KPKNL Surakarta pada Tahun Anggaran 2025 berusaha untuk meraih predikat Zona Integritas

Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagai tindak lanjut keberhasilan meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang telah diraih KPKNL Surakarta pada tahun 2019. Sebagai predikat tertinggi dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada publik, yaitu pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, KPKNL Surakarta telah melakukan berbagai perubahan dan inovasi demi tercapainya predikat tersebut. Hal baik ini akan kami lanjutkan demi mencapai hasil yang optimal.

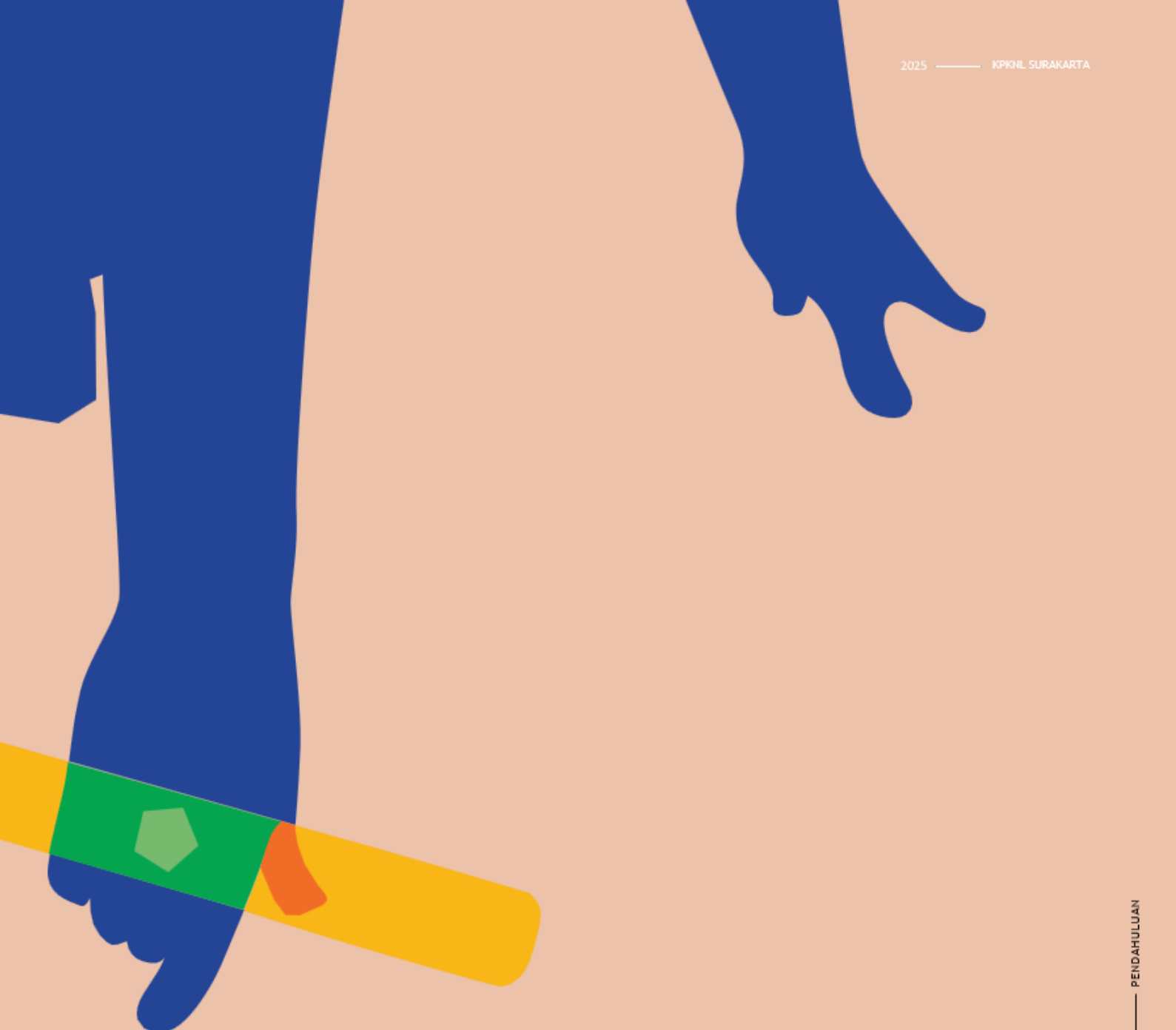
Berdasarkan Laporan Capaian Kinerja tahun 2025, KPKNL Surakarta memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 116,83%. NKO tersebut merupakan hasil perhitungan capaian IKU/Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* dengan hasil seluruh IKU berstatus hijau. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pegawai yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja KPKNL Surakarta.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPKNL Surakarta pada tahun 2025, dan dapat menjadi tolok ukur kegiatan di tahun berikutnya.

Surakarta, Februari 2026  
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  
dan Lelang Surakarta



Ditandatangani secara elektronik  
Diana Setiastanti



# 01.

## Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Sarana, Prasarana, dan Sumber Daya Manusia
- D. Peran Strategis
- E. Sistematika Laporan

## A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKN dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban DJKN dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Kepala Kantor Wilayah, dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Surakarta mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Wilayah kerja KPKNL Surakarta meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri.

## B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Selanjutnya Pasal 31 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, KPKNL menyelenggarakan fungsi:

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan panitia urusan piutang negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, piutang negara, penilaian, dan lelang;
- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
- j. pelaksanaan administrasi kpknl.

Gambar 1. 1  
Struktur Organisasi KPKNL Surakarta 2025



## C. Sarana, Prasarana, dan Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Surakarta didukung oleh sarana, prasarana dan sumber daya manusia sebagai berikut:

### 1. Sarana dan Prasarana

Sarana berupa sebidang tanah dan gedung kantor yang cukup representatif dengan luas 2.000 m2 tersebut dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 29 atas nama Departemen Keuangan Republik Indonesia, terletak di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, setempat dikenal dengan Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 141 Sumber, Surakarta. Selain itu, KPKNL Surakarta juga memiliki tanah seluas 1.043 m2 yang berasal dari penyerahan KPPN Surakarta berikut 7 (tujuh) buah bangunan rumah negara yang pada tahun 2018 lalu telah direnovasi. Tanah tersebut terdaftar dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 44 atas nama Departemen Keuangan Republik Indonesia, terletak di Jalan Melon Raya Gang Blewah XIII, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta.

Prasarana yang ada terdiri dari kendaraan dinas dan peralatan perkantoran di antaranya komputer, laptop dan peralatan lainnya.

Tabel 1. 1  
Jumlah Sarana Prasarana

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Kendaraan Roda 2	6	5	1	-
2	Kendaraan Roda 4	5	4	1	-
3	Komputer Unit	92	45	40	7
4	Peralatan Komputer	56	43	10	3

Sarana dan prasarana yang ada tersebut telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Surakarta sehingga dapat berlangsung dengan baik dan lancar.

### 2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang ada di KPKNL Surakarta sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang pegawai dengan latar belakang pendidikan, usia, jenis kelamin maupun kepangkatan dengan komposisi sebaran di masing-masing seksi sebagai berikut.

Tabel 1. 2  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon

No	Gol	Kepala Kantor	Sub Bagian / Seksi						Jumlah
			Umum	PKN	PN	HI	KI	Fungsional	
1	IV	1		1			1	2	5
2	III		10	5	5	6	3	8	37
3	II							1	1
4	I								
Jumlah									43

Tabel 1. 3  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Gol	Kepala Kantor	Sub Bagian / Seksi						Jumlah
			Umum	PKN	PN	HI	KI	Fungsional	
1	Laki-laki		6	2	3	4	1	8	24
2	Perempuan	1	4	4	2	2	3	3	19
Jumlah									43

Tabel 1. 4  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Gol	Kepala Kantor	Sub Bagian / Seksi						Jumlah
			Umum	PKN	PN	HI	KI	Fungsional	
1	S-2	1	1	1				2	6
2	D-IV/S-1		6	3	4	4	2	9	28
3	D-III		2	2		2			6
4	D-I		1		1				2
5	SLTA						1		1
Jumlah									43

Tabel 1. 5  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

No	Gol	Kepala Kantor	Sub Bagian / Seksi						Jumlah
			Umum	PKN	PN	HI	KI	Fungsional	
1	18 - 30			1				1	2
2	31 - 40		5	2		3	1	5	16
3	41 - 50	1	4	2	3	2	2	4	18
4	Diatas 50		1	1	2	1	1	1	7
Jumlah									43

Tabel 1. 6  
Komposisi Pegawai Per Subbagian/Seksi

	Umum	PKN	PN	HI	KI	Jumlah
Eselon III						
Eselon IV	1	1	1	1	1	5
Pelaksana	9	5	4	5	3	26
Jumlah	10	6	5	6	4	31

## D. Peran Strategis

KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL memiliki peran strategis yang dijabarkan sebagai berikut.

### 1. Melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara

Peran strategis KPKNL Surakarta sebagai pengelola kekayaan negara adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara dalam rangka mendukung kemandirian bangsa dan

kesejahteraan rakyat di wilayah kerja KPKNL Surakarta. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada nilai manfaat ekonomi dan sosial, pengamanan kekayaan negara, serta sinkronisasi aset terhadap program prioritas nasional. Sebagai *asset manager*, KPKNL Surakarta mengemban tugas untuk menata aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu instrumen utama dalam mendukung ketahanan pangan, energi, dan penyediaan perumahan rakyat. Hal ini dilakukan melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara (PNBP) serta penghematan belanja modal melalui skema penggunaan bersama. Fokus kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi kegiatan optimalisasi pengelolaan BMN yang mendukung Program Prioritas Nasional, khususnya dalam menyediakan lahan untuk mendukung ketahanan pangan dan program pembangunan rumah rakyat melalui sinergi dengan Badan Bank Tanah. Kegiatan pengelolaan kekayaan Negara juga menitikberatkan pada pemberian kemudahan dan penyesuaian tarif dalam rangka pemanfaatan BMN oleh UKM, melakukan pengukuran kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang/Standar Kebutuhan (SBSK) guna efisiensi belanja pemeliharaan serta masih dilakukannya identifikasi dan sertifikasi BMN berupa tanah pada Kementerian/Lembaga sebagai tindak lanjut penatausahaan dan pengelolaan BMN menuju tertib fisik, tertib administrasi dan tertib hukum.

### 2. Memberikan Pelayanan Penilaian

Peran Strategis KPKNL Surakarta di bidang penilaian adalah memberikan pelayanan penilaian dalam rangka mendapatkan nilai wajar untuk keperluan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), nilai likuidasi untuk keperluan penghapusan BMN dan nilai wajar lainnya untuk keperluan pemanfaatan BMN.

### 3. Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran Strategis KPKNL Surakarta di bidang piutang negara adalah dalam rangka menyelamatkan keuangan negara yang dilakukan dengan melakukan pengurusan piutang negara yang berasal dari piutang instansi pemerintah. Instansi Pemerintah sebagai Penyerah Piutang di wilayah kerja KPKNL Surakarta antara lain sebagai berikut.

- Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
- Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) c.q. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara
- Kementerian Perindustrian (Ditjen. Industri Kecil dan Menengah) Cq. LPT-Indak Propinsi Jawa Tengah
- LPDB-KUMKM, Kementerian Koperasi Dan UMKM
- RSUD dr. Moewardi Surakarta
- RSUP dr. Sardjito Yogyakarta
- RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
- Rumah Sakit Ortopedi Prof. dr. R. Soeharso Surakarta

### 4. Memberikan Pelayanan Lelang

Peran strategis KPKNL Surakarta di bidang pelayanan lelang adalah memberikan pelayanan permohonan lelang dari para pengguna jasa lelang (*stake holder*). Lelang yang dilaksanakan adalah lelang wajib (lelang eksekusi dan noneksekusi wajib) dan lelang sukarela. Lelang juga berfungsi sebagai sarana jual beli yang transparan, akuntabel, kompetitif, efisien dan lebih menjamin kepastian hukum. Pelayanan lelang kini bertransformasi melalui penggunaan Risalah Lelang Elektronik, yang berfungsi sebagai akta otentik digital (*akta van transport*) yang sah untuk kepentingan peralihan hak secara cepat dan aman. Sebagai instansi vertikal DJKN, KPKNL Surakarta sebagai instansi vertikal DJKN di daerah diharapkan menjadi akselerator agar lelang dapat lebih dikenal dan diminati masyarakat, sehingga

menjadi sarana transaksi pilihan dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

5. Memberikan kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dalam memberikan pelayanan di bidang piutang negara dan lelang, KPKNL Surakarta memperoleh hasil berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang yang merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain itu, KPKNL Surakarta juga turut berperan menyumbang PNBP yang berasal dari pengelolaan kekayaan Negara yang berada pada satuan kerja Kementerian/Lembaga.

## E. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPKNL Surakarta tahun 2025 ini adalah sebagai berikut.

1. Bab I Pendahuluan  
Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, dan peran strategis, serta sistematika laporan.
2. Bab II Perencanaan Kinerja  
Bagian ini menguraikan tentang ringkasan penetapan/perjanjian kinerja, metode yang digunakan dalam mengukur kinerja tahun 2025 serta adendum kinerja.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja  
Bagian ini menguraikan tentang capaian kinerja beserta analisisnya dibandingkan capaian tahun sebelumnya dan uraian atas realisasi anggaran yang digunakan.
4. Bab IV Penutup  
Bagian ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja

# 02.

## Rencana Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- C. Pengukuran Kinerja
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

## A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar, disusun secara integral, efisien, dan koordinatif, serta mengikuti alur pikir yang sistematis. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Tahun 2025-2029, perencanaan strategis dirancang melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu, dengan memperhatikan potensi, peluang, serta kendala yang mungkin timbul.

Penyusunan Renstra DJKN dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Sebagai tindak lanjut atas ketentuan tersebut, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029. Renstra DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis serta berorientasi pada pencapaian kondisi masa depan yang diharapkan dan dapat dicapai.

Penyusunan rencana kerja dan penetapan sasaran strategis pada KPKNL Surakarta tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) DJKN periode 2025-2029. Renstra ini dirancang melalui proses yang berorientasi pada hasil guna mendukung visi Kementerian Keuangan dalam mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan.

Dalam implementasinya, terdapat beberapa faktor krusial yang menitikberatkan arah kebijakan dan performa organisasi di KPKNL Surakarta, antara lain:

- Transformasi Digital dan Efisiensi Layanan: Akselerasi adaptasi teknologi informasi dalam proses bisnis, khususnya pada layanan lelang

dan pengelolaan BMN, untuk memastikan pelayanan yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat;

- Optimalisasi Nilai Aset sebagai Instrumen Fiskal: Pergeseran paradigma dari sekadar penatausahaan menjadi pengelolaan kekayaan negara yang adaptif untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna ekonomi (PNBP) maupun manfaat sosial di wilayah kerja;
- Mitigasi Risiko dan Keberlanjutan: Penguatan pengawasan, pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif guna menghadapi ketidakpastian ekonomi dan tantangan operasional di masa depan;
- Inovasi dan Pengembangan SDM: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang adaptif terhadap perubahan peraturan dan dinamika kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

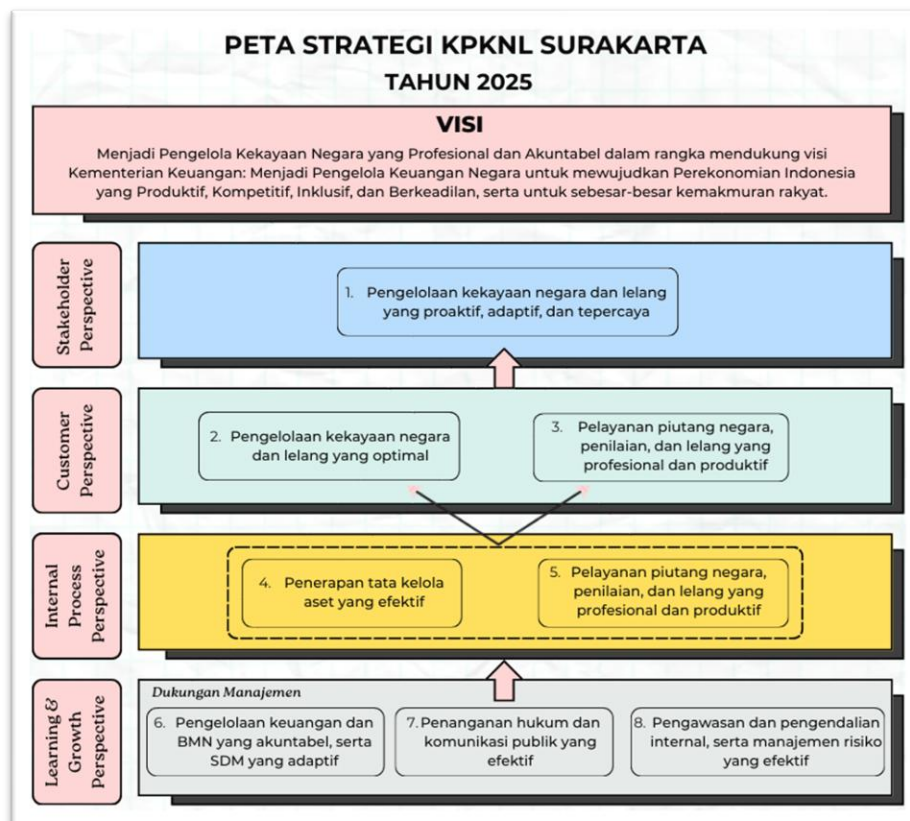
Dengan menyelaraskan arah kebijakan pada kerangka Renstra DJKN 2025-2029, KPKNL Surakarta berkomitmen untuk menjaga kesinambungan kinerja pelayanan publik yang prima dan berkontribusi nyata dalam pengamanan dan optimalisasi kekayaan negara.

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perencanaan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu perjanjian kinerja. Perencanaan kinerja diperlukan untuk menentukan arah kegiatan dan mengukur tingkat keberhasilan kinerja organisasi. Perjanjian kinerja sendiri merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi sebagaimana disebutkan di atas, KPKNL Surakarta telah menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2025, sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya;
2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal;
3. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa;
4. Penerapan tata kelola aset yang efektif;
5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif;
6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif;
7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif;
8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif.

Gambar 2. 1  
Peta Strategi KPKNL Surakarta Tahun 2025



Terdapat 4 perspektif dalam peta strategi KPKNL Surakarta, yaitu:

1. *Stakeholder Perspective*, berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholder;
2. *Customer Perspective*, berisi ekspektasi dari *customer*/pengguna jasa dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilakukan;
3. *Internal Process Perspective*, berisi proses bisnis yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan; dan
4. *Learning and Growth Perspective*, berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Sasaran Strategis (SS) yang tertuang dalam peta strategi KPKNL tahun 2025 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 19 (sembilan belas) IKU. Rincian Sasaran Strategis dan IKU KPKNL Surakarta tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1  
SASARAN STRATEGIS DAN IKU

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
<b>Stakeholder Perspective (30%)</b>				
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP	Indeks Integritas	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%
<b>Customer Perspective (20%)</b>				
2.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%
3.	Pelayanan kekayan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	74
		3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	77
<b>Internal Process Perspective (25%)</b>				
4.	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5.	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
<b>Learning and Growth Perspective (25%)</b>				
6.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7.	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8.	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80
		8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK	100

### C. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja, KPKNL Surakarta berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengukuran capaian IKU ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut.

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%.
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan yang lain.
3. IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target.
4. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
  - Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
  - Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

## D. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Nomor: PK-02/WKN.09/2026, Rencana Kinerja KPKNL Surakarta pada tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 2  
Rencana Kinerja Tahun 2026

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp. 30,3 M)
2.	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100%
		2b-N	Tingkat efektifitas pembinaan	80%
3.	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp. 3M)
		3b-CP	Persentase realisasi kinerja Lelang	100% (Rp. 435,2M)
4.	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4c-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5.	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	85%
6.	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
		6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	80
7.	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80
		7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80
8.	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks integritas organisasi	100
		8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83
		8c-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	95.6%



# 03.

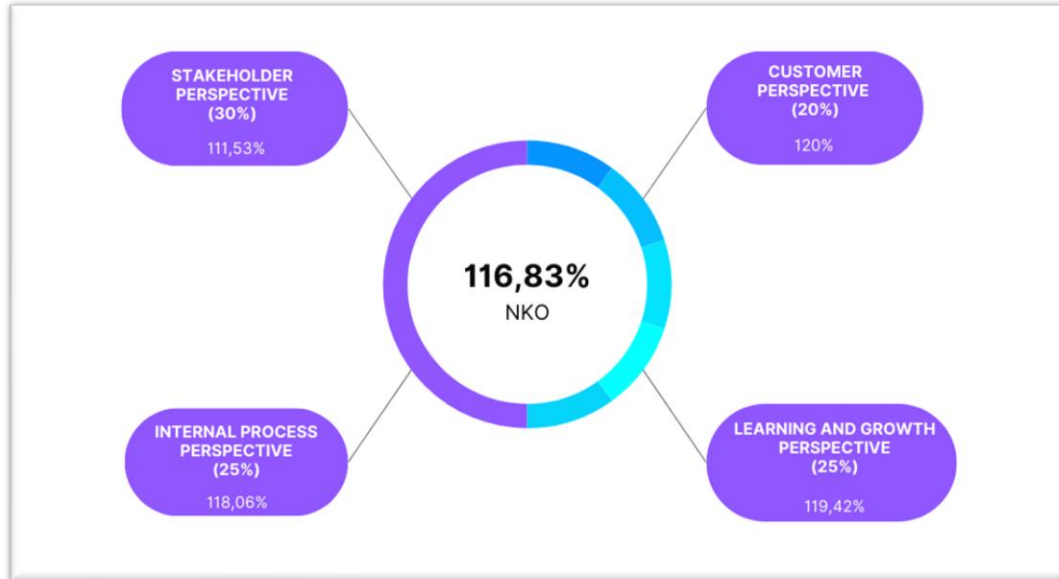
## Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Kinerja Lain-Lain
- D. Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

## A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi diukur dengan cara membanding antara target/rencana dengan capaian/realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Surakarta tahun 2025 adalah 116,83%. NKO tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut.

Gambar 3. 1  
Capaian Kinerja pada Masing-masing Perspektif



Pada tahun 2025, KPKNL Surakarta telah menetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis dan dijabarkan dalam 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2025, sebanyak 19 IKU tersebut seluruhnya berstatus hijau (capaian/realisasi ≥ 100%), sehingga NKO 2025 KPKNL Surakarta mencapai nilai 116,83%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3. 1  
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 2025

Kode	IKU	Target	Realisasi	Indeks Max. 120
<b>Stakeholder Perspective (30%)</b>				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya			111,54%
1a-CP	Indeks Integritas	100	105,32	105,32%
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	132,42%	120%
<b>Customer Perspective (20%)</b>				
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal			120%
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	121,26%	120%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	131,95%	120%
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	147,63%	120%

<b>3</b>	<b>Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa</b>	<b>120%</b>		
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	74	136,65	120%
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	77	126,61	120%
<b>Internal Process Perspective (25%)</b>				
<b>4</b>	<b>Penerapan tata kelola aset yang efektif</b>	<b>116,11%</b>		
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%	122,19%	120%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	112,22%	120%
<b>5</b>	<b>Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif</b>	<b>120%</b>		
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%	121,48	120%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	150,72%	120%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%	150 %	120%
<b>Learning and Growth Perspective (25%)</b>				
<b>6</b>	<b>Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif</b>	<b>120%</b>		
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120	120%
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	120	120%
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	122,50%	120%
<b>7</b>	<b>Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif</b>	<b>118,25%</b>		
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	116,50	116,50%
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	145,63	120%
<b>8</b>	<b>Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif</b>	<b>120%</b>		
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	124,52	120%
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK	100	134,51	120%
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO) = 116,83%</b>				

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Nomor PK-02a/WKN.09/2025 yang ditetapkan pada tanggal 17 November 2025, terdapat perubahan target dan pelaksanaan adendum untuk beberapa IKU karena telah mencapai target awal yang telah ditetapkan. Adapun rincian adendum dan perubahan target yang ditetapkan pada Periode Triwulan IV adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 2  
Adendum Perubahan Target Triwulan IV

IKU	Target Awal / Adendum	Perubahan Target Adendum	Status
Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Rp27.310.000.000	Rp29.765.405.000	Adendum
PNBP Aset	Rp10.700.000.000	-	Tetap
PNBP Lelang	Rp16.600.000.000	Rp19.051.772.000	Adendum
PNBP PN	Rp10.000.000	Rp13.633.000	Adendum
Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	57	61	Adendum
Persentase realisasi pokok lelang	Rp449.345.740.000	Rp493.508.611.000	Adendum
Pejabat Lelang Kelas I	Rp377.573.000.000	Rp421.735.87.1000	Adendum
Pegadaian	Rp71.772.740.000	-	Tetap

Penjelasan atas capaian 8 (delapan) Sasaran Strategis dan 19 (sembilan belas) IKU KPKNL Surakarta tahun 2025 selengkapnya diuraikan sebagai berikut.

### Sasaran Strategis 1: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surakarta mengidentifikasi 2 (dua) IKU. Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 3  
IKU SS 1

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	(%)	
Indeks Integritas	100	105,29	105,29%	
Indikator Kinerja Utama	Target		Realisasi	
	Nominal	(%)	Nominal	(%)
Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Rp29.765.405.000	100%	Rp39.414.044.487,50	132,42%

#### 1.a. Indeks Integritas

Realisasi IKU Indeks Integritas pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 4  
IKU Indeks Integritas

KPKNL Surakarta	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	105,32	105,32	Akumulatif
Capaian	120	120	120	120	120	105,32	105,32	

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

Realisasi Capaian IKU Indeks Integritas pada tahun 2025 adalah 105,32 sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris DJKN Nomor ND-561/KN.1/2026 tanggal 12 Februari 2026 perihal Perubahan Realisasi IKU Indeks Integritas dan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian IKU Indeks Integritas diantaranya:

1. Senantiasa mengingatkan pegawai KPKNL Surakarta terkait pentingnya integritas dalam kegiatan Serabi Solo yang rutin dilaksanakan setiap pekan;
2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi atas penanganan benturan kepentingan s.d Triwulan IV dan telah dilaporkan kepada Kanwil melalui Nota Dinas Nomor ND-1236/KNL.0902/2025 tanggal 5 Desember 2025;
3. Melaksanakan diseminasi kebijakan dan pengelolaan SDM terkait promosi/pola mutasi di lingkungan DJKN pada kegiatan Serabi Solo;
4. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Tali Kasih DJKN di lingkungan KPKNL Surakarta, yang telah disampaikan kepada Kanwil melalui Nota Dinas Nomor ND-1229/KNL.0902/2025 tanggal 4 Desember 2025.

#### 1.b. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang

Realisasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 5  
IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang

KPKNL Surakarta	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
	Dalam miliar rupiah							
Target	100% (Rp3,56)	100% (Rp10,68)	100% (Rp10,6)	100% (Rp18,87)	100% (Rp18,87)	100% (Rp29,76)	100% (Rp29,76)	Max/TLK Akumulatif
Realisasi	128,77% (Rp.4,5)	121,18% (Rp12,95)	121,18% (Rp12,95)	157,68% (Rp29,76)	157,69% (Rp29,76)	132,42% (Rp39,41)	132,42% (Rp39,41)	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Realisasi capaian PNBP dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang sampai dengan Triwulan IV 2025 sebesar Rp39.414.044.488 (132,42%) dari target Triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp29.765.405.000 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3. 6  
Rincian Kegiatan Penghasil PNBP

Kegiatan penghasil PNBP	Target	Realisasi	Persentase
PNBP Aset	Rp10.700.000.000	Rp13.676.197.918	127,81%
PNBP Piutang Negara	Rp13.633.000.000	Rp25.155.789	184,52%
PNBP Lelang	Rp19.051.772.000	Rp25.712.690.780,5	134,96%

Tercapainya target PNBP Aset sebesar 127,81% berasal dari Pemindahtanganan BMN sebesar Rp4.620.837.340, Sewa BMN sebesar Rp6.706.312.803, Penjualan Barang Rampasan sebesar Rp789.441.880, dan

Pendapatan BLU Lainnya sebesar Rp1.559.605.895.

Untuk PNBPN Lelang, realisasi berasal dari PNBPN Pejabat Lelang Kelas 1 sebesar Rp24.404.365.903 dan PNBPN Pegadaian sebesar Rp1.308.324.878.

Target IKU Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melaksanakan edukasi, koordinasi, dan penggalian potensi lelang kepada *stakeholder*;
2. Koordinasi aktif dengan pemohon lelang;
3. Aktif melakukan publikasi lelang melalui akun Instagram KPKNL Surakarta.

## Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Dalam pencapaian sasaran strategis ini KPKNL Surakarta mengidentifikasi 3 (tiga) IKU. Capaian IKU tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 7  
IKU SS 2

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	(%)	
Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	121,26%	121,26%	
Indikator Kinerja Utama	Target		Realisasi	
	Nominal	(%)	Nominal	(%)
Persentase realisasi pokok lelang	Rp493.508.611.000	100%	Rp651.205.741.887	131,95%
Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	Rp2.850.000.000	100%	Rp4.207.375.784,64	147,63%

### 2.a. Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara

Realisasi IKU tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 8  
IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara

KPKNL Surakarta	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	130,95%	132,61%	132,61%	117,55%	117,55%	121,26%	121,26%	Progresif
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Sampai dengan bulan Desember 2025, perhitungan optimalisasi aset telah tercapai sebanyak 37 NUP dengan nilai optimalisasi rata-rata sebesar 121,26% (capaian IKU maksimal 120%).

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai target tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara diantaranya:

1. Melakukan perhitungan tingkat optimalisasi pengelolaan aset target secara *on desk*, berdasarkan data persetujuan pengelolaan BMN di KPKNL Surakarta;
2. Melakukan pemantauan dan pengumpulan data ke Lapas Sragen pada tanggal 11 November 2025;

## 2.b. Persentase Realisasi Pokok Lelang

Realisasi IKU persentase realisasi pokok lelang pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 9  
IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang

KPKNL Surakarta	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
	Dalam miliar rupiah							
Target	100% (Rp67,4)	100% (Rp201,2)	100% (Rp201,2)	100% (Rp337)	100% (Rp337)	100% (Rp449,34)	100% (Rp449,34)	Max/TLK Akumulatif
Realisasi	73,42% (Rp49,49)	92,83% (Rp187,72)	92,83% (Rp187,72)	146,44% (Rp493,5)	146,44% (Rp493,5)	131,95% (Rp651,20)	131,95% (Rp651,20)	
Capaian	73,42%	92,83%	92,83%	120%	120%	120%	120%	

Target jumlah pokok lelang pada KPKNL Surakarta tahun 2025 setelah adanya adendum pada tanggal 17 November 2025 adalah sebesar Rp493.508.611.000. Realisasi pokok lelang sampai dengan Desember 2025 adalah sebesar Rp651.205.741.887 (131,95%) dengan rincian capaian realisasi Pokok Lelang Pejabat Lelang Kelas 1 sebesar Rp585.789.497.987 dan Pokok Lelang Pegadaian sebesar Rp65.416.243.900.

Target IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melaksanakan edukasi, koordinasi, dan penggalian potensi pada *stakeholder*;
2. Melaksanakan koordinasi aktif dengan pemohon lelang;
3. Aktif melakukan publikasi lelang melalui akun instagram KPKNL Surakarta.

## 2.c. Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara

Realisasi IKU persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 10  
IKU Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara

KPKNL Surakarta	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100% (Rp285Jt)	100% (Rp855Jt)	100% (Rp855Jt)	100% (Rp1,71M)	100% (Rp1,71M)	100% (Rp2,85M)	100% (Rp2,85M)	Max/TLK Akumulatif
Realisasi	345,40% (Rp984,38Jt)	120,82% (Rp1,03M)	120,82% (Rp1,03M)	106,16% (Rp1,81M)	106,16% (Rp1,81M)	147,63% (Rp4,20M)	147,63% (Rp4,20M)	
Capaian	120%	120%	120%	106,16%	106,16%	120%	120%	

Target realisasi penurunan nilai saldo piutang negara pada KPKNL Surakarta tahun 2025 adalah sebesar Rp2.850.000.000. Realisasi penurunan nilai saldo piutang negara sampai dengan Desember 2025 sebesar Rp4.207.375.784,64 (147.63%) berasal dari angsuran sebesar Rp261.301.520, pelunasan sebesar Rp 38.756.314,75, PSBDT sebesar Rp1.628.633.920, pembatalan PSBDT sebesar Rp6.317.422,88 dan koreksi Rp10.225.018 pengembalian sebesar Rp2.274.776.435.

Target IKU persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara berhasil dicapai dengan baik karena

beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melaksanakan sosialisasi pengurusan piutang daerah kepada *stakeholder*;
2. Melaksanakan sosialisasi, penggalan potensi PPDTO serta koordinasi dengan *stakeholder*;
3. Menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan debitur dan penyerah piutang terkait penyelesaian piutang;
4. Penagihan kepada debitur melalui surat;
5. Penelitian lapangan

### Sasaran Strategis 3: Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa

Dalam pencapaian sasaran strategis ini KPKNL Surakarta mengidentifikasi 2 (dua) IKU. Capaian IKU tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 11  
IKU SS 3

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	(%)
Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	74	101,12	120%
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	77	94,49	120%

#### 3.a. Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Realisasi IKU indeks efektivitas edukasi dan komunikasi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 12  
IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

KPKNL Surakarta	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa							
	Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	74	74	74	74	74	74	74	Max/Avg
Realisasi	100	98,43	99,22	108,88	102,44	97,19	101,12	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Realisasi Capaian IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Triwulan IV KPKNL Surakarta sebagai berikut.

- Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Jafung Pelelang adalah sebesar 94,51.
- Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Pengelolaan Piutang Negara adalah sebesar 99,86.

Realisasi indeks pada Triwulan IV sebesar 97,19 dan capaian akhir tahun 2025 adalah 101,12% (indeks capaian maksimal 120%)

Target IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Seksi Piutang Negara telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada BKD Sukoharjo, BKD Boyolali dan RSUD IR. Soekarno Sukoharjo selama periode Triwulan IV 2025;
2. Pelelang telah melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada PT.BPR Insan Madani pada tanggal 3 November 2025.

### 3.b. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Realisasi IKU Indeks kepuasan pengguna layanan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 13  
IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

KPKNL Surakarta	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa							
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	77	77	77	77	77	77	77	Max/Avg
Realisasi	96,17	98,6	97,39	97,4	97,39	97,8	97,49	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Survey Kepuasan Pengguna Layanan Triwulan IV telah dilaksanakan pada bulan September 2025.

Realisasi capaian Triwulan IV sebesar 4,89 (skala 5) atau 97,8 (konversi 100), sehingga capaian Triwulan IV menjadi sebesar 97,49 (rata-rata dari capaian Triwulan I, II, III dan IV).

### Sasaran Strategis 4: Penerapan Tata Kelola Aset Yang Efektif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini KPKNL Surakarta mengidentifikasi 2 (dua) IKU. Capaian IKU tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 14  
IKU SS 4

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	(%)
Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%	122,19%	120%
Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	112,22%	120%

#### 4.a. Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan

Realisasi IKU Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 15  
IKU Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan

KPKNL Surakarta	Penerapan Tata Kelola Aset Yang Efektif							
	Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	14,24%	43,05%	43,05%	92,38%	92,38%	122,19%	122,19%	Progresif
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Target tahun 2025 sebesar 302 NUP/Bidang, sedangkan realisasinya adalah sebesar 369 NUP/bidang, sehingga persentase capaian menyentuh angka 122,19%.

Target IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Pemeriksaan Fisik Penyelesaian Sertipikasi pada Badan Pembinaan Hukum TNI;
2. Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Pemeriksaan Fisik Penyelesaian Sertipikasi pada Rutan Kelas I Surakarta;
3. Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Pemeriksaan Fisik Penyelesaian Sertipikasi pada MTsN 3 Boyolali;
4. Melaksanakan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kab. Klaten dan Kab. Karanganyar terkait progres penyelesaian sertipikat.

#### 4.b. Persentase Evaluasi Kinerja BMN

Realisasi IKU Persentase evaluasi kinerja BMN pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 16  
IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN

KPKNL Surakarta	Penerapan Tata Kelola Aset Yang Efektif							
	Persentase evaluasi kinerja BMN							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	17,47%	63,53%	63,53%	97,94%	97,94%	112,22%	112,22%	Progresif
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Target Portofolio Aset sebanyak 315 NUP pengukuran dan rekomendasi, serta 16 paket/NUP yang harus ditindaklanjuti oleh Satker. Capaian sampai dengan Desember 2025 tercapai 329 NUP pengukuran dan rekomendasi (104,44%), serta 61 NUP tindak lanjut satker (capaian maksimal 120%), sehingga capaian secara keseluruhan sebesar 112,22%.

Target IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena telah dilaksanakannya pengumpulan data pengukuran kinerja/portofolio pada:

1. Kantah Sragen dan MTsN 5 Sragen tanggal 07 Oktober;
2. MTsN 6 Sragen dan MTsN 7 Sragen tanggal 08 Oktober;
3. MAN 2 Sragen tanggal 09 Oktober;
4. BPS Surakarta tanggal 06 Oktober;
5. Lanud TNI AU Adi Soemarmo tanggal 09 Oktober;
6. MAN 2 Karanganyar tanggal 10 Oktober;
7. BBGTK Prov. Jateng tanggal 07 November;
8. BBWS dan Balai Teknik Sungai tanggal 12 November;
9. ISI Surakarta tanggal 05 dan 14 November;
10. Kepolisian Resor Klaten tanggal 06 November;
11. Kepolisian Resor Boyolali tanggal 13 November;
12. KPPN Surakarta tanggal 17 Desember;
13. ISI Surakarta tanggal 18 Desember.

#### Sasaran Strategis 5: Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini KPKNL Surakarta mengidentifikasi 3 (tiga) IKU. Capaian IKU tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 17  
IKU SS 5

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	(%)
Persentase realisasi penyelesaian Berkas Piutang Negara	100%	121,48%	120%
Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	105,51%	120%
Persentase produktivitas lelang	80%	120%	120%

### 5.a. Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara

Realisasi IKU Persentase realisasi penyelesaian Berkas Piutang Negara pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 18  
IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara

KPKNL Surakarta	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif							
	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Piutang Negara pada							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	110,48%	113,4%	113,4%	117,31%	117,31%	121,48%	121,48%	Progresif
Capaian	110,48%	113,4%	113,4%	117,31%	117,31%	120%	120%	

Realisasi penyelesaian berkas piutang negara sampai dengan Desember 2025 dengan target sebesar 61 memiliki realisasi sebesar 74.1, sehingga capaian menjadi 121.48%.

Rincian perhitungan realisasi (yang dikalikan dengan bobot) adalah sebagai berikut:

- Jumlah Berkas Piutang Negara Diselesaikan Komponen 1(bobot 1,2) sebesar 5 (lunas);
- Jumlah Berkas Piutang Negara Diselesaikan Komponen 2(bobot 1,1) sebesar 51 (PSBDT);
- Jumlah Berkas Piutang Negara Diselesaikan Komponen 3(bobot 1) sebesar 12 (PPNTO).

Target IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melaksanakan koordinasi dengan Penyerah Piutang:
  - BKAD Boyolali dan RSUD Pandanaran tanggal 9 dan 10 Oktober 2025;
  - Penyerah Piutang di wilayah Wonogiri dan BKAD Wonogiri tanggal 16 dan 17 Oktober 2025;
  - BKAD Klaten sesuai tanggal 22 Oktober 2025.
2. Melaksanakan sosialisasi pengurusan piutang daerah kabupaten Boyolali tanggal 20 November 2025;
3. Melaksanakan sosialisasi, penggalian potensi PPDTO serta koordinasi dengan RSUD Ir Soekarno Sukoharjo di Sukoharjo tanggal 19 Desember 2025.

### 5.b. Tingkat Kualitas Layanan Penilaian

Realisasi IKU Tingkat kualitas layanan penilaian pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 19  
IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian

KPKNL Surakarta	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif							
	Tingkat kualitas layanan penilaian							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Max/TLK
Realisasi	108,30%	101,5%	101,5%	106,72%	106,72%	105,5%	105,5%	Akumulatif
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Realisasi IKU Tingkat kualitas layanan penilaian Triwulan IV sebesar 105,50% berdasarkan realisasi komponen berikut:

- Komponen Norma Waktu Layanan Penilaian sebesar 95%;
- Komponen Akurasi Data Layanan Penilaian sebesar 100%;
- Komponen Nilai Hasil Kaji Ulang Laporan Penilaian sebesar 125%.

Target IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Menyelesaikan layanan penilaian secara tepat waktu;
2. Monitoring pelaksanaan layanan penilaian melalui aplikasi SARKARA.

### 5.c. Persentase Produktivitas Lelang

Realisasi IKU Persentase produktivitas lelang pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 20  
IKU Persentase Produktivitas Lelang

KPKNL Surakarta	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif							
	Persentase produktivitas lelang							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi	64,66%	83,50%	83,50%	110,75%	110,75%	120%	120%	Akumulatif
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Realisasi Persentase produktivitas lelang s.d Triwulan IV 2025 adalah sebesar 120% dari target sebesar 80%, sehingga capaian menjadi 120%. Realisasi tersebut diperoleh dari perhitungan komponen sebagai berikut:

- Rata-rata capaian Lot Lelang Laku adalah sebesar 120%, yang terdiri dari:
  - Capaian Lot Laku lelang noneksekusi sukarela sebesar 107,32%;
  - Capaian Lot Laku lelang noneksekusi wajib sebesar 175,92%;
  - Capaian Lot Laku lelang eksekusi HT, Pailit, dan Pengadilan sebesar 263,58%;
  - Capaian Lot Laku lelang eksekusi selain HT, Pailit dan Pengadilan sebesar 11,40%.
- Persentase Frekuensi Lelang sebesar 120% dengan jumlah target frekuensi lelang 1484 dan realisasi mencapai 2185 Frekuensi.

Target IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- Melaksanakan edukasi, koordinasi, dan penggalian potensi pada *stakeholder*;
- Koordinasi aktif dengan pemohon lelang;
- Telah aktif melakukan publikasi lelang melalui akun instagram KPKNL Surakarta.

### Sasaran Strategis 6: Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, Serta SDM yang Adaptif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini KPKNL Surakarta mengidentifikasi 3 (tiga) IKU. Capaian IKU tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 21  
IKU SS 6

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	(%)
Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100	120	120%
Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	120	120%
Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	98%	120%

### 6.a. Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

Realisasi IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 22  
IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

KPKNL Surakarta	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, Serta SDM yang Adaptif							
	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	Akumulatif
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Capaian IKU IKA sampai dengan bulan Desember 2025 dihitung dengan formula  $[50\% \times \text{nilai IKPA} + 50\% \times \text{nilai SMART}]$ . Nilai IKPA sampai dengan bulan Desember 2025 adalah sebesar 100, sedangkan nilai SMART sampai dengan bulan Desember adalah sebesar 98,5. Sehingga Capaian Realisasi IKU IKA adalah sebesar 99,25. Nilai tersebut termasuk dalam kategori Index Realisasi  $\geq 98,00$ , sehingga Capaian IKU IKA adalah sebesar 120.

Target IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan monitoring pelaksanaan Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk belanja setiap bulan;
2. Monitoring penyerapan anggaran;
3. Monitoring seluruh Capaian Output dari unit teknis;
4. Melaksanakan rapat penyusunan RPD Triwulan IV 2025.

### 6.b. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa

Realisasi IKU Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 23  
IKU Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa

KPKNL Surakarta	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, Serta SDM yang Adaptif							
	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	Akumulatif
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Realisasi Tingkat Penggunaan Produk dalam Negeri adalah sebesar 120%, sedangkan Realisasi Indeks Tata Kelola Pengadaan sebesar 120%, sehingga capaian IKU ITKP sebesar 120%.

Target IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Optimalisasi capaian pada aspek pengadaan dhi. penggunaan aplikasi SIMPeL, LPSE, dan SIUK-PBJ;
2. Melaksanakan pengadaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan target realisasi anggaran Triwulan IV 2025;
3. Melaksanakan penyerapan anggaran secara optimal yaitu 99,11% dari total Dipa setelah blokir.

### 6.c. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Realisasi IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 24  
IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

KPKNL Surakarta	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, Serta SDM yang Adaptif							
	Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi	30,57%	63,79%	63,79%	86%	86%	98%	98%	Progresif
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Realisasi IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai sampai dengan Triwulan IV 2025 adalah sebesar 98% sehingga capaian IKU menjadi 120% dari target Triwulan IV 2025 sebesar 80% dengan rincian perhitungan capaian sebagai berikut:

- Capaian Subkomponen Penguatan Budaya dan Bintel Pejabat Administrator Triwulan IV 2025 sebesar 120%;
- Capaian Subkomponen Pemenuhan Jam Pelatihan (JP), sebanyak 42 pegawai (total pegawai KPKNL Surakarta) telah memenuhi 25 JP dan memenuhi usulan DKI, sedangkan persentase pemenuhan panggilan diklat sampai dengan triwulan IV 2025 adalah 100% (panggilan diklat sebanyak 27 dan pemenuhan panggilan 27), sehingga realisasi menjadi sebesar 100%.

Target IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan evaluasi atas perkembangan kompetensi pegawai.;
2. Telah dilaksanakan *Sharing knowledge* Kolaborasi Lintas Generasi : 'Membangun Lingkungan Kerja yang Harmonis dan Produktif' pada tanggal 17 November 2025;
3. Telah dilaksanakan *Sharing knowledge* Kolaborasi Lintas Generasi: 'Generasi Beda Tujuan Sama: Strategi Menciptakan Tempat Kerja yang Sehat dan Inklusif' pada tanggal 15 Desember 2025.;
4. Telah dilaksanakan kegiatan bintel bidang kejiwaan dengan tema 'Pembentukan Keluarga Harmonis' pada tanggal 16 Desember 2025.

### Sasaran Strategis 7: Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini KPKNL Surakarta mengidentifikasi 2 (dua) IKU. Capaian IKU tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 25  
IKU SS 7

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	(%)
Indeks penanganan permasalahan hukum	100	116,5	116,5%
Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	116,5	120%

### 7.a. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum

Realisasi IKU Indeks penanganan permasalahan hukum pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 26  
IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum

KPKNL Surakarta	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif							
	Indeks penanganan permasalahan hukum							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	115,49	113,95	113,95	115,16	115,16	116,5	116,5	Akumulatif
Capaian	115,49%	113,95%	113,95%	115,16%	115,16%	116,5%	116,5%	

Capaian IKU Indeks penanganan permasalahan hukum Triwulan IV adalah sebesar 116,50% dengan rincian capaian sebagai berikut:

- Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan sebesar 114,04;
- Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap sebesar 126,35.

Target IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Berkoordinasi dengan unit terkait (seksi lelang);
2. Peningkatan kualitas dalam proses penanganan perkara.

### 7.b. Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Realisasi IKU Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 27  
IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

KPKNL Surakarta	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif							
	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/Avg
Realisasi	115	118	116,5	118	117	115	116,5	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Realisasi Indeks PPID Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 115 dari target sebesar 80 (capaian IKU maksimal 120%) dengan rincian sebagai berikut:

- Ketepatan waktu penyampaian informasi publik atas permintaan informasi publik dari pengguna layanan adalah Nihil (tidak ada permintaan informasi publik pada Triwulan IV);
- Ketepatan waktu penyampaian laporan informasi publik sebesar 120;
- Ketepatan waktu penyediaan dan pemutakhiran informasi publik pada website sebesar 110.

Target IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Penyediaan dan pemutakhiran informasi publik pada website secara tepat waktu;
2. Penyampaian informasi publik atas permintaan informasi publik dari pengguna layanan secara tepat waktu;
3. Penyediaan dan pemutakhiran informasi publik pada website secara tepat waktu.

## Sasaran Strategis 8: Pengawasan dan Pengendalian Internal, Serta Manajemen Risiko yang Efektif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini KPKNL Surakarta mengidentifikasi 2 (dua) IKU. Capaian IKU tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 28  
IKU SS 8

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	(%)
Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	99,62	120%
Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK	100	134,51	120%

### 8.a. Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

Realisasi IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 29  
IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

KPKNL Surakarta	Pengawasan dan Pengendalian Internal, Serta Manajemen Risiko yang Efektif							
	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/TLK
Realisasi	100	99,77	99,82	99,71	99,81	99,70	99,62	Akumulatif
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Realisasi IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko Triwulan IV adalah 99,70 dan realisasi akhir tahun 2025 sebesar 99,62 sehingga capaian akhir tahun sebesar 124,52% (batas capaian IKU maksimal 120%).

Target IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena telah melaksanakan pemenuhan dokumen kertas kerja review atas implementasi manajemen risiko, kinerja organisasi, serta pegawai dengan tertib dan akurat.

### 8.b. Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK

Realisasi IKU Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 30  
IKU Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK

KPKNL Surakarta	Pengawasan dan Pengendalian Internal, Serta Manajemen Risiko yang Efektif							
	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	100	100	100	100	100	134,51	134,51	Akumulatif
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	120%	120%	

KPKNL Surakarta mendapatkan capaian sebesar 134,51 berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-4436/KN.1/2025 tanggal 29 Desember 2025 hal Penyampaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi Keberlanjutan ZI-WBK/WBBM Tahun 2025 serta Capaian IKU Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan ZI-WBK/WBBM Tahun 2025 Periode Triwulan IV 2025.

Target IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi rencana kerja keberlanjutan pembangunan ZI-WBK bulan Oktober-November 2025.

## B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung seluruh operasional dan pencapaian target strategis organisasi, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta telah mengelola sumber daya keuangan yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025. Alokasi anggaran ini merupakan instrumen penting dalam membiayai berbagai kegiatan layanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, serta pelaksanaan lelang di wilayah kerja KPKNL Surakarta.

Tabel 3. 31  
Realisasi Anggaran 2025

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Persentase
Belanja Pegawai	0	0	0%
Belanja Barang	Rp2.213.813.000	Rp2.196.636.507	99,22%
Belanja Modal	Rp88.118.000	Rp84.734.931	96,16%
<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp2.301.931.000</b>	<b>Rp2.281.371.438</b>	<b>99,11%</b>

Berdasarkan data keuangan akhir tahun 2025, total pagu anggaran yang dialokasikan untuk KPKNL Surakarta adalah sebesar Rp2.301.931.000. Dari pagu anggaran tersebut, realisasi belanja barang dan belanja modal sebesar Rp2.281.371.438. Dengan ini, capaian realisasi anggaran KPKNL Surakarta pada tahun 2025 mencapai angka 99,11%.

## C. Kinerja Lain-lain

### 1. Perbaikan Publikasi Standar Pelayanan di Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Surakarta

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik harus menetapkan standar pelayanan. Atas dasar hal ini, pada tahun 2025 KPKNL Surakarta melakukan dua hal perbaikan terkait standar pelayanan di Area Pelayanan Terpadu (APT). Pada bulan April 2025, telah dilaksanakan perubahan dan pencetakan ulang Maklumat Pelayanan KPKNL Surakarta serta telah dibuat desain baru terkait informasi standar pelayanan yang telah disesuaikan dengan peraturan terbaru dan berdasar hasil survey yang telah dilaksanakan.

Dengan adanya perubahan dan pembaharuan ini diharapkan pengguna layanan pada KPKNL Surakarta dapat teredukasi dengan baik terkait layanan yang ada di KPKNL Surakarta, serta untuk mendukung keberlanjutan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) pada KPKNL Surakarta Tahun 2025.

### 2. Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan

Survei Kepuasan Pengguna Layanan merupakan instrumen strategis yang digunakan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara negara. Secara esensial, survei ini berfungsi sebagai kanal bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk memberikan umpan balik langsung atas setiap interaksi layanan yang mereka terima. Pentingnya pelaksanaan survei ini terletak pada fungsinya sebagai sistem deteksi dini untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, sekaligus sebagai tolak ukur transparansi dan akuntabilitas instansi. Dengan data yang diperoleh, organisasi dapat menyusun kebijakan yang berbasis data guna memastikan bahwa standar pelayanan tetap relevan dengan kebutuhan dan harapan publik yang terus berkembang.

Sebagai bentuk nyata dari komitmen terhadap pelayanan prima, KPKNL Surakarta secara konsisten melaksanakan pemantauan kualitas layanan melalui survei berkala. Berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2025, KPKNL Surakarta berhasil memperoleh nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan sebesar 4,89 dari skala 5,00. Pencapaian yang mendekati angka sempurna ini mencerminkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi dari pengguna layanan terhadap berbagai aspek, mulai dari kompetensi petugas pelayanan, kepastian waktu, hingga kenyamanan sarana prasarana. Nilai 4,89 ini tidak hanya sekadar angka, namun merupakan representasi dari dedikasi seluruh jajaran di KPKNL Surakarta dalam menjalankan nilai-nilai Kementerian Keuangan dan memberikan solusi terbaik bagi setiap pengguna layanan. Capaian ini menjadi motivasi bagi unit untuk terus berinovasi dan mempertahankan predikat layanan yang menuju kesempurnaan.

### 3. Prestasi KPKNL Surakarta

KPKNL Surakarta berhasil menunjukkan performa luar biasa sepanjang tahun 2025 dengan meraih penghargaan **Juara Umum (Anugerah Karya Adiyatma)** sebagai kantor dengan kinerja terbaik di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta tahun 2025.

Berikut adalah rincian penghargaan yang diraih dalam berbagai kategori.

#### Peringkat I (Terbaik 1):

- Nilai Kinerja Organisasi terbaik
- Pengelolaan BMN dan Arsip terbaik
- Pengelolaan SDM terbaik
- Kinerja Lelang terbaik
- Kinerja Pengelolaan Risiko dan Kepatuhan Internal terbaik

#### Peringkat II (Terbaik 2):

- Kinerja Penilaian terbaik
- Persentase Capaian Bidang Piutang Negara terbaik
- Kinerja Bidang Hukum terbaik

#### Peringkat III (Terbaik 3):

- Pengelolaan Keuangan terbaik
- Kategori Nagara Banda Vardhana
- Kategori Artha Sahaya Karya
- Kategori Ketertiban Risalah Lelang Terbaik

Keberhasilan meraih posisi juara umum ini membuktikan upaya KPKNL Surakarta dalam menjalankan fungsi pengelolaan kekayaan negara, pelayanan lelang, serta manajemen internal organisasi yang efektif. Prestasi ini menjadi pondasi kuat untuk menyongsong target kinerja yang lebih optimal di tahun 2026.

## D. Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja KPKNL Surakarta pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan tercapainya Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 116,83%. Capaian ini didukung oleh keberhasilan seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berjumlah 19 poin dalam mencapai target dengan status hijau atau realisasi di atas 100%. Salah satu parameter keberhasilan akuntabilitas kinerja lainnya adalah dengan tingginya tingkat kepercayaan publik, di mana Indeks Kepuasan Pengguna Layanan mencapai skor 4,89 dari skala 5,00.

Aspek krusial dalam evaluasi tahun ini adalah efisiensi operasional yang memungkinkan organisasi melampaui target tahunan sebelum periode berakhir. Hal ini terlihat dari adanya kebijakan adendum target pada Triwulan IV untuk beberapa indikator strategis. Mekanisme adendum ini dilakukan sebagai bentuk eskalasi kinerja atas target yang telah terpenuhi lebih awal, seperti pada sektor PNBPN Lelang yang ditingkatkan dari target awal Rp16,6 miliar menjadi Rp19,05 miliar. Selain itu, Persentase Realisasi Pokok Lelang juga mengalami penyesuaian target menjadi Rp493,5 miliar. Keberhasilan dalam memenuhi target adendum tersebut membuktikan bahwa KPKNL Surakarta memiliki performa yang tangguh dalam mengoptimalkan potensi penerimaan negara.

Di sisi pengembangan internal, akuntabilitas organisasi juga diperkuat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Realisasi pengembangan kompetensi pegawai mencapai 122,50% (indeks maksimal 120%), yang menunjukkan komitmen organisasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang adaptif dan profesional. Sejalan dengan hal tersebut, pengelolaan layanan informasi melalui PPID juga mencatatkan hasil yang positif dengan indeks sebesar 116,5, memastikan bahwa hak publik atas informasi terpenuhi dengan transparan dan tepat waktu.

Sebagai rencana keberlanjutan untuk tahun 2026, organisasi akan terus melakukan pemantauan intensif terhadap setiap sasaran strategis guna mempertahankan standar pelayanan yang sudah terbentuk. Fokus akan diarahkan pada penguatan manajemen risiko serta pengawasan internal yang lebih efektif. Reposisi indikator integritas ke dalam sasaran pengawasan diharapkan dapat menjaga konsistensi akuntabilitas organisasi secara menyeluruh, sehingga KPKNL Surakarta dapat terus memberikan solusi pelayanan yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.

A stylized illustration of a hand holding a rolled-up document. The hand is rendered in a dark blue silhouette, with the fingers gripping a yellow and orange scroll. The background is a light gray gradient, accented with abstract shapes in green, white, and orange. A large, thick orange ribbon-like shape curves across the lower half of the page, framing the chapter title.

# 04.

Penutup

## A. Penutup

Laporan Kinerja KPKNL Surakarta Tahun 2025 merupakan perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang. Secara keseluruhan, organisasi menunjukkan performa yang sangat baik dengan raihan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai 116,83%. Seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berjumlah 19 poin berhasil meraih status hijau atau melampaui target yang ditetapkan. Salah satu parameter keunggulan pelayanan tercermin dari Indeks Kepuasan Pengguna Layanan yang mencapai skor 4,89 dari skala 5,00. Efisiensi kerja yang baik juga ditunjukkan melalui adanya adendum target pada Triwulan IV. Pencapaian melampaui target tahunan sebelum periode berakhir memicu eskalasi target pada beberapa indikator strategis, seperti PNPB Lelang dan Realisasi Pokok Lelang, yang tetap berhasil dipenuhi dengan hasil optimal hingga akhir tahun.

Sebagai pedoman untuk menjaga keberlanjutan kinerja yang optimal di masa mendatang, KPKNL Surakarta menetapkan langkah-langkah strategis sebagai berikut.

a. Pengelolaan Kekayaan Negara:

- Meningkatkan sosialisasi dan komunikasi intensif dengan satuan kerja (satker) K/L untuk mengoptimalkan pengelolaan BMN;
- Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Kantor Pertanahan guna mempercepat proses sertifikasi tanah BMN;
- Meningkatkan kapasitas dan pemahaman peraturan pegawai melalui kegiatan capacity building dan diklat teknis secara berkala.

b. Pengurusan Piutang Negara:

- Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara KPKNL dengan Penyerah Piutang;
- Mendorong inovasi dan terobosan baru dalam pengurusan piutang negara.

c. Pelayanan Lelang:

- Mengintensifkan pemasaran objek lelang bekerja sama dengan pemohon serta menggali potensi lelang UMKM;
- Meningkatkan kapasitas Pelelang secara berkelanjutan serta memperkuat pembinaan dan pengawasan intensif guna menjaga kualitas layanan.

d. Pelayanan Penilaian:

- Menyelenggarakan *knowledge sharing* dan diskusi internal secara rutin untuk menjaga kualitas dan akurasi laporan penilaian.

e. Subbagian Umum:

- Melakukan asistensi pengelolaan DIPA antar unit untuk menjaga kualitas pelaksanaan anggaran.

f. Kepatuhan Internal:

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala atas predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai landasan persiapan menuju pembangunan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

g. Hukum dan Informasi:

- Meningkatkan peran fungsi kehumasan dalam menyebarkan informasi tugas dan fungsi organisasi agar lebih inklusif dan dikenal oleh masyarakat luas.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga dapat memberikan gambaran yang transparan dan menjadi instrumen evaluasi yang memacu produktivitas organisasi di periode berikutnya. Besar harapan kami agar eksistensi dan pelayanan KPKNL Surakarta dapat memberikan manfaat serta nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat luas.





KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



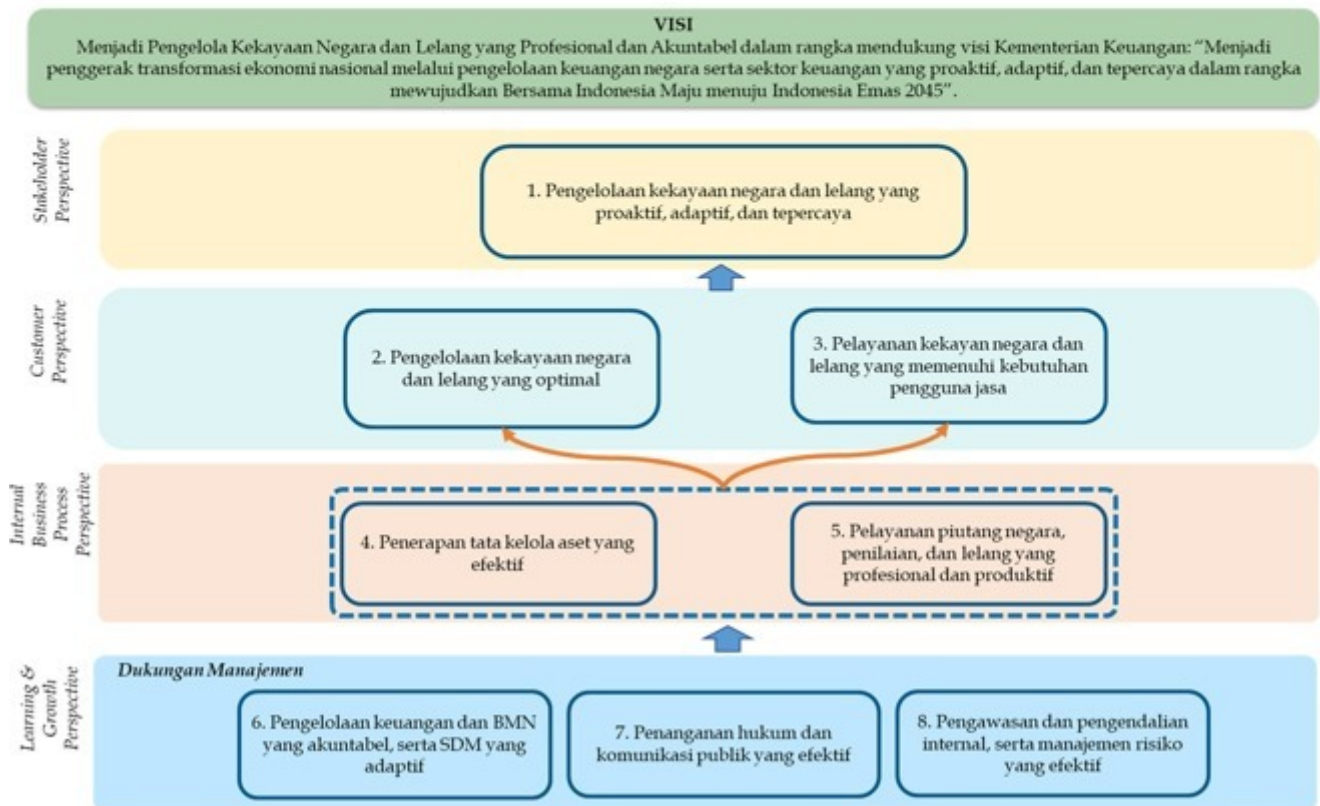
**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK-02/WKN.09/2025**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**SURAKARTA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

**Pernyataan Kesanggupan**

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Peta Strategi**



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
SURAKARTA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	1a-CP Indeks integritas	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp. 27,3 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp.449,3M)
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp. 2,8 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3b-N Indeks kepuasan pengguna layanan	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8b-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK	100

**Program/Kegiatan 2025**

Program:

**Anggaran**



Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp538,890,000
Kegiatan	
1. Komunikasi, Edukasi dan Standarisasi	Rp42,511,000
2. Pengelolaan Aset	Rp496,379,000
Program:	
Program Dukungan Manajemen	Rp2,072,116,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp115,638,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	Rp1,847,252,000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp71,264,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	Rp37,962,000

Kota Surakarta, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Kekayaan Negara Jawa Tengah dan  
D.I. Yogyakarta



Ditandatangani Secara Elektronik  
Tri Wahyuningsih Retno Mulyani

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  
Lelang Surakarta



Ditandatangani Secara Elektronik  
Mohamad Lukman Saleh



**RINCIAN TARGET KINERJA**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**SURAKARTA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya</b>							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp. 27,3 M)
<b>2</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal</b>							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp. 449,3 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp. 2,8 M)
<b>3</b>	<b>Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa</b>							
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
<b>4</b>	<b>Penerapan tata kelola aset yang efektif</b>							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
<b>5</b>	<b>Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif</b>							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
<b>6</b>	<b>Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif</b>							
6a-CP	Indeks Kualitas Kinerja	100	100	100	100	100	100	100



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	Anggaran							
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
<b>7</b>	<b>Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif</b>							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
<b>8</b>	<b>Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif</b>							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK	100	100	100	100	100	100	100

Kota Surakarta, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta



Ditandatangani Secara Elektronik  
Mohamad Lukman Saleh



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Kota Surakarta, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta



Ditandatangani Secara Elektronik  
Mohamad Lukman Saleh



**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Mohamad Lukman Saleh		NAMA	Tri Wahyuningsih Retno Mulyani
NIP	19690918 199703 1 002		NIP	19650304 199103 2 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp. 27,3 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp.449,3M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp. 2,8 M)	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayan negara dan lelang yang memenuhi	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan
		Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025*



	kebutuhan pengguna jasa			
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>-Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>-Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>-Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>-Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>-Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>-Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Kota Surakarta, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Tri Wahyuningsih Retno Mulyani  
19650304 199103 2 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik  
Mohamad Lukman Saleh  
19690918 199703 1 002



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	43 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp. 27,3 M)
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp.449,3 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp. 2,8 M)
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74



3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-CP	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK	100	100	100	100	100	100	100

#### KONSEKUENSI

*Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*



Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kota Surakarta, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Tri Wahyuningsih Retno Mulyani  
19650304 199103 2 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik  
Mohamad Lukman Saleh  
19690918 199703 1 002





**PERJANJIAN KINERJA  
NOMOR: PK-02a/WKN.09/2025  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
SURAKARTA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2025**



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
SURAKARTA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP Indeks integritas	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp.29,7 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp.493,5M)
		2b-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp. 2,8 M)
		2c-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
3	Pelayanan kekayan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3b-N Indeks kepuasan pengguna layanan	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5b-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-CP Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8b-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK	100

**Program/Kegiatan 2025**

**Anggaran**

Program:



Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Kegiatan	Rp538,890,000
1. Komunikasi, Edukasi dan Standarisasi	Rp42,511,000
2. Pengelolaan Aset	Rp496,379,000
Program:	
Program Dukungan Manajemen Kegiatan	Rp2,072,116,000
1. Legislasi dan Litigasi	Rp115,638,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	Rp1,847,252,000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp71,264,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	Rp37,962,000

Surakarta, 17 November 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Kekayaan Negara Jawa Tengah dan  
D.I. Yogyakarta



Ditandatangani Secara Elektronik  
Nikodemus Sigit Rahardjo

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  
Lelang Surakarta



Ditandatangani Secara Elektronik  
Diana Setiastanti



**RINCIAN TARGET KINERJA**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**SURAKARTA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya</b>							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp.29,7 M)
<b>2</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal</b>							
2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp.493,5 M)
2b-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp. 2,8 M)
2c-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
<b>3</b>	<b>Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa</b>							
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
<b>4</b>	<b>Penerapan tata kelola aset yang efektif</b>							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
<b>5</b>	<b>Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif</b>							
5a-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5b-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
<b>6</b>	<b>Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif</b>							
6a-N	Persentase pengembangan	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	kompetensi pegawai							
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-CP	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
<b>7</b>	<b>Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif</b>							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
<b>8</b>	<b>Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif</b>							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK	100	100	100	100	100	100	100

Surakarta, 17 November 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta



Ditandatangani Secara Elektronik  
Diana Setiastanti



**INISIATIF STRATEGIS  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2025**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Surakarta, 17 November 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta



Ditandatangani Secara Elektronik  
Diana Setiastanti



**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Oktober s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Diana Setiastanti		NAMA	Nikodemus Sigit Rahardjo
NIP	19751230 200212 2 001		NIP	19720902 199301 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp.29,7 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp.493,5M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp. 2,8 M)	Penerima Layanan
		Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayan negara dan lelang yang memenuhi	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan
		Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 17 November 2025*



	kebutuhan pengguna jasa			
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>-Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>-Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>-Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>-Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>-Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>-Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Surakarta, 17 November 2025

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Diana Setiastanti  
19751230 200212 2 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Nikodemus Sigit Rahardjo  
19720902 199301 1 001

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 17 November 2025*



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Oktober s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	43 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp.29,7 M)
2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp.493,5 M)
2b-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp. 2,8 M)
2c-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74



3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5b-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-CP	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK	100	100	100	100	100	100	100

#### KONSEKUENSI

*Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*



Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Surakarta, 17 November 2025

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Diana Setiastanti  
19751230 200212 2 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Nikodemus Sigit Rahardjo  
19720902 199301 1 001



**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025**

**KEMEN/LEMB** (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT ORG** (09) Ditjen Kekayaan Negara  
**UNIT KERJA** (119511) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA  
**ALOKASI** Rp. 2,611,006,000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
015.09.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko			538,890,000	
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi			42,511,000	
4796.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi[Program Baru - Perubahan Kebijakan]	3.0 orang, kegiatan		42,511,000	
-----					
	Lokasi : KOTA SURAKARTA				
4796.AEF.001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	1.0 orang		18,632,000	
100	Tidak Ada Komponen			18,632,000	U
A	Bimbingan Teknis/Sosialisasi/FGD di Bidang Barang Milik Negara			18,632,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.028-Surakarta )			14,360,000	RM
	> Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara			14,360,000	
	- Makan Rapat Biasa [60 ORG x 1 HARI x 2 FREK]	120.0 OK	69,000	8,280,000	
	- Snack Rapat Biasa [60 ORG x 1 HARI x 4 FREK]	240.0 OK	17,000	4,080,000	
	- Belanja Banner	1.0 THN	2,000,000	2,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.028-Surakarta )			3,552,000	A RM
	> Kunjungan Asistensi Ke Satuan Kerja			3,552,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [2 ORG x 1 HARI x 6 LOK x 1 FREK]	12.0 OH	296,000	3,552,000	*
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.028-Surakarta )			720,000	A RM
	> Kunjungan Asistensi Ke Satuan Kerja			720,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam (Jawa Tengah) [2 ORG x 1 HARI x 3 LOK]	6.0 OH	120,000	720,000	*
4796.AEF.002	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	1.0 orang		19,866,000	
100	Tidak Ada Komponen			19,866,000	U
A	Bimbingan Teknis/Sosialisasi/FGD di Bidang Piutang Negara			19,866,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.028-Surakarta )			7,050,000	RM
	> Kegiatan Sosialisasi dan Rekonsiliasi Pengurusan Piutang Negara			7,050,000	
	- Belanja Banner	1.0 THN	2,000,000	2,000,000	
	- Makan Rapat Biasa [25 ORG x 1 FREK x 2 HR]	50.0 OK	69,000	3,450,000	
	- Snack Rapat Biasa [25 ORG x 2 FREK x 2 HR]	100.0 OK	16,000	1,600,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.028-Surakarta )			10,656,000	A RM
	> Kunjungan Asistensi Ke Penyerah Piutang			10,656,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [2 ORG x 1 HARI x 18 LOK x 1 FREK]	36.0 OH	296,000	10,656,000	*
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.028-Surakarta )			2,160,000	A RM
	> Kunjungan Asistensi Ke Penyerah Piutang			2,160,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam (Jawa Tengah) [2 ORG x 1 HARI x 9 FREK]	18.0 OH	120,000	2,160,000	*

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025**

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
 UNIT ORG (09) Ditjen Kekayaan Negara  
 UNIT KERJA (119511) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA  
 ALOKASI Rp. 2,611,006,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4796.AEF.003	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	1.0 orang		4,013,000	
100	Tidak Ada Komponen			4,013,000	U
A	Bimbingan Teknis/Sosialisasi/FGD di Bidang Lelang			4,013,000	
521211	Belanja Bahan			2,713,000	PNP
	(KPPN.028-Surakarta )				
	- Pengadaan Backdrop/Spanduk/Cetakan bahan sosialisasi	1.0 THN	973,000	973,000	
	- Makan Rapat Biasa JAWA TENGAH [20 ORG x 1 HARI x 1 FREK]	20.0 OK	55,000	1,100,000	
	- Snack Rapat Biasa JAWA TENGAH [20 ORG x 1 HARI x 2 FREK]	40.0 OK	16,000	640,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			1,000,000	A PNP
	(KPPN.028-Surakarta )				
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [2 ORG x 1 HARI x 2 LOK x 1 FREK]	4.0 OH	250,000	1,000,000	*
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			300,000	A PNP
	(KPPN.028-Surakarta )				
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam (Jawa Tengah) [3 ORG x 1 HARI x 1 FREK]	3.0 OH	100,000	300,000	*
4798	Pengelolaan Aset			496,379,000	
4798.AAH	Peraturan lainnya[Program Baru - Perubahan Kebijakan]	145.0 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan		175,504,000	
-----					
	Lokasi : KOTA SURAKARTA				
4798.AAH.001	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	120.0 Surat Keputusan		110,256,000	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			110,256,000	U
A	Penelitian Awal dan Pemberian Rekomendasi Lingkup KPKNL			13,056,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			10,656,000	A RM
	(KPPN.028-Surakarta )				
	> Verifikasi Lapangan Atas Permohonan Layanan			10,656,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [2 ORG x 1 HARI x 18 FREK]	36.0 OH	296,000	10,656,000	*
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			2,400,000	A RM
	(KPPN.028-Surakarta )				
	> Verifikasi Lapangan Atas Permohonan Layanan			2,400,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam (Jawa Tengah) [2 ORG x 1 HARI x 10 FREK]	20.0 OH	120,000	2,400,000	*
B	Survey Lapangan dan Penilaian			97,200,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			79,920,000	A RM
	(KPPN.028-Surakarta )				
	> Survey Lapangan Dalam Rangka Penilaian Pengelolaan BMN			79,920,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [3 ORG x 1 HARI x 90 FREK]	270.0 OH	296,000	79,920,000	*

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025**

**KEMEN/LEMB** (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT ORG** (09) Ditjen Kekayaan Negara  
**UNIT KERJA** (119511) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA  
**ALOKASI** Rp. 2,611,006,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.028-Surakarta )			17,280,000	A	RM
	> Survey Lapangan Dalam Rangka Penilaian Pengelolaan BMN			17,280,000		
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam (Jawa Tengah) [3 ORG x 1 HARI x 48 FREK]	144.0 OH	120,000	17,280,000	*	
<b>4798.AAH.002</b>	<b>Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara</b>	<b>25.0 Surat Keputusan</b>		<b>65,248,000</b>		
<b>005</b>	<b>Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit</b>			<b>65,248,000</b>	<b>U</b>	
<b>A</b>	<i>Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara</i>			<i>65,248,000</i>		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.028-Surakarta )			55,648,000	A	RM
	> Penyelesaian BKN Melalui Pemeriksaan, Penagihan Atau Sita			55,648,000		
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [2 ORG x 1 HARI x 94 FREK]	188.0 OH	296,000	55,648,000	*	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.028-Surakarta )			9,600,000	A	RM
	> Penyelesaian BKN Melalui Pemeriksaan, Penagihan Atau Sita			9,600,000		
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam (Jawa Tengah) [2 ORG x 1 HARI x 40 FREK]	80.0 OH	120,000	9,600,000	*	
<b>4798.ABA</b>	<b>Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan[Program Baru - Perubahan Kebijakan]</b>	<b>315.0 Rekomendasi Kebijakan, Kajian</b>		<b>32,032,000</b>		
<b>4798.ABA.002</b>	Lokasi : KOTA SURAKARTA <b>Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset</b>	<b>315.0 Rekomendasi Kebijakan</b>		<b>32,032,000</b>		
<b>005</b>	<b>Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit</b>			<b>32,032,000</b>	<b>U</b>	
<b>A</b>	<i>Implementasi Evaluasi Portofolio Aset</i>			<i>32,032,000</i>		
521211	Belanja Bahan (KPPN.028-Surakarta )			3,552,000		RM
	- Makan Rapat Biasa JAWA TENGAH [30 ORG x 1 HARI x 1 FREK]	30.0 OK	69,000	2,070,000		
	- Snack Rapat Biasa JAWA TENGAH [30 ORG x 1 HARI x 2 FREK]	60.0 OK	17,000	1,020,000		
	- Backdrop dan Banner	1.0 THN	462,000	462,000		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.028-Surakarta )			23,680,000	A	RM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [2 ORG x 2 HARI x 20 FREK]	80.0 OH	296,000	23,680,000	*	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.028-Surakarta )			4,800,000	A	RM
	- Uang Harian Perjalanan Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam (Jawa Tengah) [2 ORG x 2 HARI x 10 FREK]	40.0 OH	120,000	4,800,000	*	
<b>4798.BAH</b>	<b>Pelayanan Publik Lainnya[Kegiatan Baru - Perubahan Kebijakan]</b>	<b>1000.0 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik</b>		<b>26,466,000</b>		
<b>4798.BAH.001</b>	Lokasi : KOTA SURAKARTA <b>Risalah Lelang</b>	<b>1000.0 dokumen</b>		<b>26,466,000</b>		
<b>100</b>	<b>Tidak Ada Komponen</b>			<b>26,466,000</b>	<b>U</b>	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025**

**KEMEN/LEMB** (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT ORG** (09) Ditjen Kekayaan Negara  
**UNIT KERJA** (119511) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA  
**ALOKASI** Rp. 2,611,006,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	TANPA SUB KOMPONEN			26,466,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.028-Surakarta)			4,882,000	PNP
	- Banner	1.0 THN	982,000	982,000	
	- Makan Rapat Biasa JAWA TENGAH [50 ORG x 1 HARI x 1 FREK]	50.0 OK	62,000	3,100,000	
	- Snack Rapat Biasa JAWA TENGAH [50 ORG x 1 HARI x 1 FREK]	50.0 OK	16,000	800,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.028-Surakarta)			18,944,000	A PNP
	> Pelaksanaan Lelang Luar Kota			18,944,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [2 ORG x 1 HARI x 32 FREK]	64.0 OH	296,000	18,944,000	*
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.028-Surakarta)			2,640,000	A PNP
	> Pelaksanaan Lelang Dalam Kota			2,640,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Jawa Tengah) [2 ORG x 1 HARI x 11 FREK]	22.0 OH	120,000	2,640,000	*
4798.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan[Program Baru - Perubahan Kebijakan] Lokasi : KOTA SURAKARTA	5.0 Laporan, Rekomendasi		70,506,000	
4798.FAE.004	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	1.0 Rekomendasi		17,808,000	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			17,808,000	U
A	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN Kewenangan KPKNL			17,808,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.028-Surakarta)			14,208,000	A RM
	> Pemantauan atas Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN			14,208,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [2 ORG x 1 HARI x 18 FREK]	36.0 OH	296,000	10,656,000	*
	>> Investigasi atas Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN		0	3,552,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [2 ORG x 1 HARI x 6 FREK]	12.0 OH	296,000	3,552,000	*
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.028-Surakarta)			3,600,000	A RM
	> Pemantauan atas Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN			3,600,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam (Jawa Tengah) [2 ORG x 1 HARI x 9 FREK]	18.0 OH	120,000	2,160,000	*
	>> Investigasi atas Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN		0	1,440,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam (Jawa Tengah) [2 ORG x 1 HARI x 6 FREK]	12.0 OH	120,000	1,440,000	*
4798.FAE.005	Rekomendasi Hasil Penilaian	2.0 Rekomendasi		16,800,000	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			16,800,000	U
A	Penyusunan Basis Data dan Informasi Penilaian			8,400,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025**

**KEMEN/LEMB** (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT ORG** (09) Ditjen Kekayaan Negara  
**UNIT KERJA** (119511) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA  
**ALOKASI** Rp. 2,611,006,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.028-Surakarta ) > Survei Basis Data - Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam (JawaTengah) [2 ORG x 7 FREK x 5 HARI]	70.0 OK	120,000	8,400,000	A	RM
B	<u>Penyusunan Daftar Komponen Penilaian Bangunan (DKPB)</u>			8,400,000	*	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.028-Surakarta ) - Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam (Jawa Tengah) [2 ORG x 7 HARI x 5 FREK]	70.0 OH	120,000	8,400,000	A	RM
<b>4798.FAE.007</b>	<b>Penggalian Potensi Lelang</b>	<b>2.0 Rekomendasi</b>		<b>35,898,000</b>		
<b>100</b>	<b>Tidak Ada Komponen</b>			<b>35,898,000</b>	<b>U</b>	
A	<i>Penggalian Potensi Lelang kepada Stakeholder</i>			35,898,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.028-Surakarta ) - Banner [0 ORG0 x 0 HARI x 0 FREK] - Makan Rapat Biasa [50 ORG x 1 HARI x 1 FREK] - Snack Rapat Biasa (Jawa Tengah) [50 ORG x 1 HARI x 1 FREK]	2.0 PCS 50.0 OK 50.0 OK	485,000 60,000 16,000	970,000 3,000,000 800,000		PNP
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.028-Surakarta ) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [3 ORG x 4 HARI x 4 FREK] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (Jawa Tengah) [2 ORG x 2 HARI x 4 FREK] - Transport Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [3 ORG x 4 FREK]	48.0 OH 16.0 OH 12.0 OK	296,000 600,000 450,000	14,208,000 9,600,000 5,400,000	A	PNP
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.028-Surakarta ) - Uang Harian Perjalanan Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam (Jawa Tengah) [4 ORG x 1 HARI x 4 FREK]	16.0 OH	120,000	1,920,000	A	PNP
<b>4798.FAK</b>	<b>Pengelolaan Aset BUN[Program Baru - Perubahan Kebijakan]</b>	<b>9.0 Unit, Aset</b>		<b>47,602,000</b>		
<b>4798.FAK.001</b>	Lokasi : KOTA SURAKARTA <b>Aset BUN yang Dikelola</b>	<b>9.0 Aset</b>		<b>47,602,000</b>		
<b>005</b>	<b>Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit</b>			<b>47,602,000</b>	<b>U</b>	
A	<i>Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-Lain</i>			47,602,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.028-Surakarta ) > Aset Eks BPPN - Makan Rapat Biasa [10 ORG x 1 BLN x 1 FRE] - Snack Rapat Biasa [10 ORG x 1 BLN x 1 FREK] - Fotokopi dan Penjilidan Laporan movev [1 THN]	10.0 OF 10.0 OF 1.0 THN	30,000 15,000 1,000,000	1,450,000 300,000 150,000 1,000,000		RM

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025**

**KEMEN/LEMB** (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT ORG** (09) Ditjen Kekayaan Negara  
**UNIT KERJA** (119511) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA  
**ALOKASI** Rp. 2,611,006,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.028-Surakarta ) > Aset Eks BPPN - Uang Balas Jasa Waker [9 Aset x 12 Bulan]	108.0 OB	300,000	32,400,000 32,400,000 32,400,000		RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.028-Surakarta ) > Aset Eks BPPN >> Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Eks BPPN - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [2 ORG x 3 HARI x 2 FREK] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Eselon IV/Golongan III (Jawa Tengah) [2 ORG x 2 HARI x 2 FREK] - Transportasi [2 ORG x 2 FREK]	12.0 OH 8.0 OK 4.0 OK	296,000 400,000 400,000	8,352,000 8,352,000 0 3,552,000 3,200,000 1,600,000	A   *	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.028-Surakarta ) > Aset Eks BPPN >> Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Eks BPPN - Uang Transport Dalam Kota [3 ORG x 3 HARI x 5 FREK]	45.0 OH	120,000	5,400,000 5,400,000 5,400,000	A  *	RM
4798.UAE	<u>Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan[Program Baru - Perubahan Kebijakan]</u> Lokasi : KOTA SURAKARTA	1430.0 Laporan, Rekomendasi		144,269,000		
4798.UAE.201	<b>Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipatkan (PN)</b>	1430.0 Rekomendasi		144,269,000		
005	<b>Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit</b>			144,269,000	U	
A	<i>Koordinasi dengan Kantor Pertanahan (Kantah) dan K/L</i>			144,269,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.028-Surakarta ) - Makan Rapat Biasa JAWA TENGAH [25 ORG x 1 HARI x 4 FREK] - Snack Rapat Biasa JAWA TENGAH [25 ORG x 1 HARI x 4 FREK]	100.0 OK 100.0 OK	55,000 16,000	7,100,000 5,500,000 1,600,000		RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.028-Surakarta ) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [3 ORG x 3 HARI x 23 FREK] - Transportasi [3 ORG x 23 FREK] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (JAWA TENGAH) [3 ORG x 2 HARI x 23 FREK]	207.0 OH 69.0 OK 138.0 OH	296,000 249,000 402,000	133,929,000 61,272,000 17,181,000 55,476,000	A  *	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.028-Surakarta ) - Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Jawa Tengah) [3 ORG x 3 HARI x 3 FREK]	27.0 OH	120,000	3,240,000 3,240,000	A *	RM
015.09.WA	<u>Program Dukungan Manajemen</u>			2,072,116,000		
4700	<u>Legislasi dan Litigasi</u>			115,638,000		

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025**

**KEMEN/LEMB** (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT ORG** (09) Ditjen Kekayaan Negara  
**UNIT KERJA** (119511) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA  
**ALOKASI** Rp. 2,611,006,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4700.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Program Baru - Perubahan Kebijakan]	70.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		115,638,000	
	Lokasi : KOTA SURAKARTA				
4700.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	70.0 Layanan		115,638,000	
100	Tidak Ada Komponen			115,638,000	U
A	Pelaksanaan Advokasi Hukum			115,638,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.028-Surakarta )			20,214,000	RM
	- Biaya Beracara di Pengadilan	1.0 THN	20,214,000	20,214,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.028-Surakarta )			78,144,000	A RM
	> Penanganan Perkara di Pengadilan Luar Kota			78,144,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [1 ORG x 1 HARI x 264 FREK]	264.0 OH	296,000	78,144,000	*
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.028-Surakarta )			17,280,000	A RM
	> Penanganan Perkara di Pengadilan Dalam Kota			17,280,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam (Jawa Tengah) [1 ORG x 1 HARI x 144 FREK]	144.0 OH	120,000	17,280,000	*
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum			1,847,252,000	
4701.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi[Program Baru - Perubahan Kebijakan]	2.0 Unit		9,846,000	
	Lokasi : KOTA SURAKARTA				
4701.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	2.0 Unit		9,846,000	
100	Tidak Ada Komponen			9,846,000	U
TK	Hardware Lainnya			9,846,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.028-Surakarta )			9,846,000	RM
	- Uninterruptible Power Supply (UPS)	2.0 UNIT	4,923,000	9,846,000	
4701.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Program Baru - Perubahan Kebijakan]	24.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		1,759,042,000	
	Lokasi : KOTA SURAKARTA				
4701.EBA.002	Kerumahtanggaan	12.0 Layanan		65,852,000	
100	Tidak Ada Komponen			65,852,000	U
A	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan			65,852,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.028-Surakarta )			4,172,000	RM
	- Penggandaan dokumen lampiran risalah lelang dan lampiran laporan penilaian	1.0 TH	4,172,000	4,172,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025**

**KEMEN/LEMB** (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT ORG** (09) Ditjen Kekayaan Negara  
**UNIT KERJA** (119511) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA  
**ALOKASI** Rp. 2,611,006,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.028-Surakarta )			55,440,000	A	RM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [3 ORG x 3 HARI x 8 FREK]	72.0 OH	296,000	21,312,000	*	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Eselon IV/Golongan III (Jawa Tengah) [3 ORG x 2 HARI x 8 FREK]	48.0 OH	486,000	23,328,000	*	
	- Transportasi [3 ORG x 8 FREK]	24.0 OK	450,000	10,800,000	*	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.028-Surakarta )			6,240,000	A	RM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Jawa Tengah) [2 ORG x 1 HR x 26 FREK]	52.0 OH	120,000	6,240,000	*	
<b>4701.EBA.994</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>12.0 Layanan</b>		<b>1,693,190,000</b>		
<b>002</b>	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>			<b>1,693,190,000</b>	<b>U</b>	
<b>A</b>	<i>Pembayaran Biaya Operasional Kantor</i>			<i>967,541,000</i>		
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.028-Surakarta )			605,238,000		RM
	- keperluan Sehari-hari Perkantoran kurang 40 Pegawai (Jawa Tengah)	1.0 STKR	60,870,000	60,870,000		
	- Honorarium Satpam dan Pengemudi (Jawa Tengah) [7 ORG x 12 BULAN]	84.0 OB	2,314,000	194,376,000		
	- Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti (Jawa Tengah) [8 ORG x 12 BULAN]	96.0 OB	2,269,000	217,824,000		
	- Honorarium Satpam dan Pengemudi Dalam Rangka Perayaan Hari Keagamaan (Jawa Tengah) [7 ORG x 1 BULAN]	7.0 OB	2,314,000	16,198,000		
	- Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti Dalam Rangka Perayaan Hari Keagamaan (Jawa Tengah) [8 ORG x 1 BULAN]	8.0 OB	2,269,000	18,152,000		
	- Jamuan Tamu	1.0 TH	8,000,000	8,000,000		
	> <u>Belanja Pakaian Dinas</u>			89,818,000		
	- Pakaian Dinas Pegawai (Jawa Tengah) [43 PEG x 2 SETEL]	86.0 SETEL	718,000	61,748,000		
	- Pakaian Kerja Satpam (Jawa Tengah) [5 ORG x 2 SETEL]	10.0 SETEL	1,469,000	14,690,000		
	- Pakaian Kerja Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti (Jawa Tengah) [10 ORG x 2 SETEL]	20.0 SETEL	669,000	13,380,000		
521113	<u>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</u> (KPPN.028-Surakarta )			8,816,000		RM
	- Vitamin dan Obat-Obatan [58 ORG x 8 FREK x 1 THN]	464.0 OK	19,000	8,816,000		
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.028-Surakarta )			43,200,000		RM
	- Biaya Pengiriman Surat Dinas	12.0 BLN	3,600,000	43,200,000		

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025**

**KEMEN/LEMB** (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT ORG** (09) Ditjen Kekayaan Negara  
**UNIT KERJA** (119511) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA  
**ALOKASI** Rp. 2,611,006,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.028-Surakarta )			135,960,000	RM
	> Honorarium Operasional Satuan Kerja			135,960,000	
	>> Honorarium Pengelola Anggaran		0	57,000,000	
	- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (Pagu Dana Di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2.5 Miliar) [1 ORG x 12 BULAN]	12.0 OB	1,370,000	16,440,000	
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (Pagu Dana Di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2.5 Miliar) [1 ORG x 12 BULAN]	12.0 OB	1,330,000	15,960,000	
	- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan SPM (Pagu Dana Di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2.5 Miliar) [1 ORG x 12 BULAN]	12.0 OB	530,000	6,360,000	
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran (Pagu Dana Di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2.5 Miliar) [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	470,000	5,640,000	
	- Honorarium Staf Pengelola (Pagu Dana Di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2.5 Miliar) [3 ORG x 12 BULAN]	36.0 OB	350,000	12,600,000	
	>> Honorarium Pengelola PNBPN		0	54,480,000	
	- Honorarium Atasan Langsung Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar) [1 ORG x 12 BULAN]	12.0 OB	930,000	11,160,000	
	- Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar) [1 ORG x 12 BULAN]	12.0 OB	760,000	9,120,000	
	- Honorarium Anggota Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar) [5 ORG x 12 BULAN]	60.0 OB	570,000	34,200,000	
	>> Honorarium Pengelola SAI		0	12,000,000	
	- Honorarium Penanggung Jawab (UAKPABarang) [1 ORG x 12 BULAN]	12.0 OB	200,000	2,400,000	
	- Honorarium Koordinator (UAKPABarang) [1 ORG x 12 BULAN]	12.0 OB	200,000	2,400,000	
	- Honorarium Ketua/Wakil Ketua (UAKPABarang) [2 ORG x 12 BULAN]	24.0 OB	150,000	3,600,000	
	- Honorarium Anggota/Petugas (UAKPABarang) [2 ORG x 12 BULAN]	24.0 OB	150,000	3,600,000	
	>> Honorarium Pengurus Barang		0	4,320,000	
	- Honorarium Pengurus BMN Tingkat Kuasa Pengguna Barang [2 ORG x 12 BULAN]	24.0 OB	180,000	4,320,000	
	>> Honorarium Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan		0	8,160,000	
	- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa [1 ORG x 12 BULAN]	12.0 OB	680,000	8,160,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.028-Surakarta )			174,327,000	RM
	- ATK, Cetak, Benda Pos, Materai, dan Suplai Komputer [1 TAHUN]	1.0 THN	174,327,000	174,327,000	
<i>B</i>	<u>Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u>			401,054,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.028-Surakarta )			356,725,000	RM
	> Pemeliharaan Gedung Kantor			356,725,000	
	- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (Jawa Tengah)	2000.0 M2	173,000	346,000,000	
	- Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor (Jawa Tengah)	975.0 M2	11,000	10,725,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025**

**KEMEN/LEMB** (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT ORG** (09) Ditjen Kekayaan Negara  
**UNIT KERJA** (119511) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA  
**ALOKASI** Rp. 2,611,006,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya (KPPN.028-Surakarta )			44,329,000	RM
	- Pemeliharaan Bangunan Aula	432.0 M2	97,000	41,904,000	
	- Pemeliharaan Bangunan Musholla	25.0 M2	97,000	2,425,000	
C	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			228,005,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.028-Surakarta )			228,005,000	RM
	> Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran			228,005,000	
	- Pemeliharaan Inventaris Kantor	43.0 PEG	80,000	3,440,000	
	- Pemeliharaan LCD Projector	3.0 UNIT	650,000	1,950,000	
	- Pemeliharaan Genset 100 KVA	1.0 UNIT	10,150,000	10,150,000	
	- Pemeliharaan CCTV	1.0 UNIT	5,000,000	5,000,000	
	- Pemeliharaan A.C. Split	23.0 UNIT	610,000	14,030,000	
	- Pemeliharaan Kamera	1.0 UNIT	3,000,000	3,000,000	
	>> Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		0	190,435,000	
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Jawa Tengah)	4.0 UNIT	38,220,000	152,880,000	
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 Pengadaan TA 2025 (Jawa Tengah)	1.0 UNIT	19,110,000	19,110,000	
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Jawa Tengah)	3.0 UNIT	5,270,000	15,810,000	
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Jawa Tengah)	1.0 UNIT	2,635,000	2,635,000	
F	Sewa Lainnya			30,000,000	
522141	Belanja Sewa (KPPN.028-Surakarta )			30,000,000	RM
	- Sewa Mesin Fotokopi dan Printer [5 UNIT x 12 BULAN]	60.0 UB	250,000	15,000,000	
	- Sewa Rak Arsip [20 UNIT x 3 BLN]	60.0 UB	250,000	15,000,000	
TJ	Jasa Pemeliharaan/Annual Technical Support (ATS)			66,590,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.028-Surakarta )			66,590,000	RM
	- Pemeliharaan Personal Computer/Notebook	68.0 UNIT	730,000	49,640,000	
	- Pemeliharaan Printer	20.0 UNIT	690,000	13,800,000	
	- Pemeliharaan Scanner	9.0 UNIT	350,000	3,150,000	
4701.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Program Baru - Perubahan Kebijakan] Lokasi : KOTA SURAKARTA	11.0 Unit, m2, Paket		78,364,000	
4701.EBB.001	Peralatan Fasilitas Perkantoran	10.0 Unit		50,364,000	
100	Tidak Ada Komponen			50,364,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			50,364,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025**

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
 UNIT ORG (09) Ditjen Kekayaan Negara  
 UNIT KERJA (119511) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA  
 ALOKASI Rp. 2,611,006,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.028-Surakarta )			50,364,000	
	- Sound System	1.0 UNIT	14,915,000	14,915,000	
	- Meja untuk APT	2.0 UNIT	8,500,000	17,000,000	
	- Mesin Pompa Air	1.0 UNIT	5,300,000	5,300,000	
	- Alat Penghancur Kertas	1.0 UNIT	1,899,000	1,899,000	
	- Rak Besi	5.0 UNIT	2,250,000	11,250,000	
<b>4701.EBB.003</b>	<b>Kendaraan Bermotor</b>	<b>1.0 Unit</b>		<b>28,000,000</b>	
<b>100</b>	<b>Tidak Ada Komponen</b>			<b>28,000,000</b>	<b>U</b>
KA	<i>Kendaraan Dinas Operasional Roda 2</i>			28,000,000	
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.028-Surakarta )			28,000,000	RM
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	1.0 Unit	28,000,000	28,000,000	
4702	<u>Pengelolaan komunikasi dan informasi publik</u>			71,264,000	
4702.BMB	<u>Komunikasi Publik[Program Baru - Perubahan Kebijakan]</u>	12.0 layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume		71,264,000	
----- Lokasi : KOTA SURAKARTA					
<b>4702.BMB.002</b>	<b>Kehumasan</b>	<b>10.0 kegiatan</b>		<b>27,952,000</b>	
<b>100</b>	<b>Tidak Ada Komponen</b>			<b>27,952,000</b>	<b>U</b>
A	<i>Pelaksanaan Publikasi</i>			27,952,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.028-Surakarta )			5,000,000	RM
	- Pembuatan property, Banner, Spanduk 1 THN	1.0 THN	5,000,000	5,000,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.028-Surakarta )			15,000,000	RM
	- Public Campaign/Iklan Layanan/Konferensi Pers 1 THN	1.0 THN	15,000,000	15,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.028-Surakarta )			6,512,000	A RM
	> Peliputan Luar Kota			6,512,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [2 ORG x 1 HARI x 11 FREK]	22.0 OH	296,000	6,512,000	*
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.028-Surakarta )			1,440,000	A RM
	> Peliputan Dalam Kota			1,440,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Jawa Tengah) [2 ORG x 1 HARI x 6 FREK]	12.0 OH	120,000	1,440,000	*
<b>4702.BMB.003</b>	<b>Pameran/Eksibisi</b>	<b>2.0 kegiatan</b>		<b>43,312,000</b>	
<b>100</b>	<b>Tidak Ada Komponen</b>			<b>43,312,000</b>	<b>U</b>
A	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			43,312,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025**

**KEMEN/LEMB** (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT ORG** (09) Ditjen Kekayaan Negara  
**UNIT KERJA** (119511) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA  
**ALOKASI** Rp. 2,611,006,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.028-Surakarta )			33,360,000	RM
	> Pameran / Public Hearing			33,360,000	
	- Pembuatan property, booth, Banner, Sewa Panggung, Sewa Sound System, Sewa Kostum 1 THN	1.0 THN	14,000,000	14,000,000	
	- Pengadaan Souvenir	160.0 PCS	50,000	8,000,000	
	- Makan Rapat Biasa JAWA TENGAH [80 ORG x 1 HR x 2 FREK]	160.0 OK	55,000	8,800,000	
	- Snack Rapat Biasa JAWA TENGAH [80 ORG x 1 HR x 2 FREK]	160.0 OK	16,000	2,560,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.028-Surakarta )			2,000,000	RM
	- Belanja Iklan 1 THN	1.0 THN	2,000,000	2,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.028-Surakarta )			6,512,000	A RM
	> Peliputan Luar Kota			6,512,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [2 ORG x 1 HARI x 11 FREK]	22.0 OH	296,000	6,512,000	*
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.028-Surakarta )			1,440,000	A RM
	> Peliputan Dalam Kota			1,440,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Jawa Tengah) [2 HR x 1 ORG x 6 FREK]	12.0 OH	120,000	1,440,000	*
4704	<u>Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal</u>			37,962,000	
4704.EBD	<u>Layanan Manajemen Kinerja Internal[Program Baru - Perubahan Kebijakan]</u>		5.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	37,962,000	
4704.EBD.001	Lokasi : KOTA SURAKARTA <b>Rekomendasi Kepatuhan Internal</b>	<b>5.0 Dokumen</b>		<b>37,962,000</b>	
100	<b>Tidak Ada Komponen</b>			<b>37,962,000</b>	U
A	<i>Implementasi Pengendalian dan Kepatuhan Internal</i>			37,962,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.028-Surakarta )			12,330,000	RM
	> Kegiatan Sosialisasi PPG			5,650,000	
	- Belanja Banner	1.0 THN	500,000	500,000	
	- Makan Rapat Biasa [50 ORG x 1 HARI x 1 FREK]	50.0 OK	69,000	3,450,000	
	- Snack Rapat Biasa [50 ORG x 1 HARI x 2 FREK]	100.0 OK	17,000	1,700,000	
	> Kegiatan Bimbingan Mental (Bintal)			6,680,000	
	- Belanja Banner	1.0 THN	500,000	500,000	
	- Makan Rapat Biasa [60 ORG x 1 HARI x 1 FREK]	60.0 OK	69,000	4,140,000	
	- Snack Rapat Biasa [60 ORG x 1 HARI x 2 FREK]	120.0 OK	17,000	2,040,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.028-Surakarta )			21,312,000	A RM
	> Observasi Pengendalian Intern Luar Kota			21,312,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [2 ORG x 1 HARI x 36 FREK]	72.0 OH	296,000	21,312,000	*

## RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

**KEMEN/LEMB** (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT ORG** (09) Ditjen Kekayaan Negara  
**UNIT KERJA** (119511) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA  
**ALOKASI** Rp. 2,611,006,000

Halaman : 13

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.028-Surakarta ) > Observasi Pengendalian Intern Dalam Kota - Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Jawa Tengah) [1 ORG x 1 HARI x 36 FREK]	36.0 OH	120,000	4,320,000  4,320,000 4,320,000	A  *	RM

Catatan : 1. U = Komponen Utama  
 2. P = Komponen Penunjang  
 3. \* = Blokir

null, 6 Januari 2025

**null**  
null